

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TA 2026

DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PURBALINGGA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Rancangan Awal Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2026. Renja Rancangan Awal OPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan yang harus dilakukan oleh Dinas Kesehatan, agar dapat menentukan prioritas pembangunan kesehatan.

Renja Rancangan Awal Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kami menyadari dalam penyusunan Renja ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan rancangan rencana kerja dimaksud.

Semoga Allah Swt selalu melimpahkan petunjuk dan kekuatan bagi kita sekalian dalam melaksanakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Purbalingga, dalam upaya kita bersama untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Amien.

Purbalingga, Desember 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PURBALINGGA

dr. JUSI FEBRIANTO, MPH

Pembina Tk I

NIP. 19700219 200212 1 004



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR-----	1
DAFTAR ISI-----	2
BAB I-----	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II-----	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja pada Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	28
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	63
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	64
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	85
2.6 Strategi Untuk Peningkatan Kinerja.....	92
BAB III-----	93
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	93
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	96
3.3 Program dan kegiatan Perangkat Daerah	97
BAB IV-----	102
BAB V-----	136

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menyebutkan pembangunan kesehatan masyarakat memerlukan upaya kesehatan, sumber daya kesehatan, dan pengelolaan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya berdasarkan prinsip kesejahteraan, pemerataan, nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif, mengurangi kesenjangan, memperkuat pelayanan kesehatan bermutu, meningkatkan ketahanan kesehatan, menjamin kehidupan yang sehat, serta memajukan kesejahteraan seluruh warga negara dan daya saing bangsa bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Tujuan Pembangunan Kesehatan sebagai salah satu upaya dalam pemenuhan hak dasar rakyat, yaitu mempermudah masyarakat dalam memperoleh akses atas kebutuhan pelayanan kesehatan. Hal ini mengingat bahwa pembangunan kesehatan merupakan suatu investasi jangka panjang dalam kaitannya untuk mendukung kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi yang kompetitif, serta peningkatan kesejahteraan sosial, yang pada akhirnya dapat sebagai upaya penanggulangan kemiskinan. Arah pembangunan kesehatan Kabupaten Purbalingga secara umum adalah terselenggaranya program pembangunan kesehatan yang mendukung tercapainya Visi pembangunan Kabupaten Purbalingga yaitu ***“Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia* “**. Untuk dapat mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi :

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang professional, efektif, inovatif, bersih, akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat.
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadirat Allah SWT/ Tuhan YME, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok masyarakat utamanya pangan dan papan secara layak.

4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat.
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja.
6. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan pedesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah/ infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan

Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga mempunyai peran dan berkontribusi dalam tercapainya seluruh misi kabupaten utamanya misi keempat yaitu *“Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Utamanya melalui Peningkatan Derajat Pendidikan dan Derajat Kesehatan Masyarakat”* maka Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga harus menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang profesional dan paripurna. Profesional dimaknai sebagai pola pikir, pola sikap dan pola tindak yang sistematis, transparan dan akuntabel dari para pelaku di jajaran Dinas Kesehatan. Kesehatan Paripurna dimaknai sebagai isu kesehatan yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diperankan oleh semua pelaku kesehatan baik eksekutif, legislatif, yudikatif, dunia usaha dan atau lembaga non pemerintah serta masyarakat secara profesional dan bertanggungjawab termasuk penyediaan sumber daya kesehatan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 109);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 adalah menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang

secara umum akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2026.

Tujuan penyusunan Renja PD adalah agar dokumen perencanaan yang disusun dapat dijadikan acuan pembangunan oleh berbagai pihak agar dalam melaksanakan kegiatan tercapai sinergitas antar dokumen perencanaan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja PD Tahun 2026:

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

BAB. II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PADA TAHUN LALU

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja pada Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- D. Review terhadap Rancangan akhir RKPD
- E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- B. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja pada Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah tahun lalu dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Kinerja Tujuan dan Sasaran

Hingga akhir tahun 2024, Dinas Kesehatan telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun perbandingan capaian indikator kerja utama Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat sebagai berikut :

TAHUN 2023					TAHUN 2024						
Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian Kinerja	% Capaian Kinerja
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		Usia Harapan Hidup	Tahun	73,98	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		Usia Harapan Hidup	Tahun	74	74,19	100,26
	Meningkatnya implementasi SAKIP Dinkes	Nilai SAKIP Dinkes	Nilai	73,51		Menurunnya angka morbiditas dan mortalitas	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 KH	67,57	5,28	70,83
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 KH	102,44			Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000 KH	7,57	13,25	57,12

		Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1000 KH	14,03			Angka Kematian Balita (AKBA)	Per 1.000 KH	9,05	15,76	57,41
		Angka Kematian Balita (AKBA)	Per 1000 KH	16,63			Indeks Keluarga Sehat	Nilai	0,50	0,62	124
		Indikator Keluarga Sehat	%	0,44		Meningkatnya kapasitas sumber daya kesehatan	Rasio Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terhadap jumlah penduduk	Per 5000 penduduk	1,5	1,64	109,33
							Rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk	Per 100.000 KH	337,9	350,51	103,73
					Meningkatnya kualitas kelembagaan Dinkes		Nilai kematangan perangkat daerah	Angka	39	40	102,57
						Meningkatnya implementasi SAKIP Dinkes	Nilai SAKIP Dinkes	Angka	73,6	73,81	100,29
Rata – rata capaian kinerja											91,73

2. Kinerja Program dan Kegiatan

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan
Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2024
Kabupaten Purbalingga

[illegible]

1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1450 orang	1457 orang	1705 orang	1705 orang	100%	1640 orang	1640 orang	100%
1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	54 dokumen	54 dokumen	54 dokumen	54 dokumen	100%	54 dokumen	54 dokumen	100%
1.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100	5 dokumen	5 dokumen	100%
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum dinas yang di fasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase perundang-undangan yang terselesaikan disosialisasi	100%	100%	100%			100%	100%	100%
1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	36 orang	36 orang	36 orang			36 orang	36 orang	100%
1.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 orang	30 orang	30 orang			30 orang	30 orang	100%

1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase adminitrasi umum perangkat daerah yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 laporan	50 laporan	50 laporan	50 laporan	100%	50 laporan	50 laporan	100%
1.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	100%	9 dokumen	9 dokumen	100%
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	42 unit	1 unit	3 unit	3 unit	100%	1 unit	1 unit	100%

1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dokumen yang harus dikirim	100%	82,69%	100%	83,65%	83,65%	100%	100%	100%
1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20 laporan	2 laporan	20 laporan	3 laporan	15%	20 laporan	20 laporan	100%
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 laporan	48 laporan	60 laporan	60 laporan	100%	60 laporan	60 laporan	100%
1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	24 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	42 unit	39 unit	39 unit	39 unit	100%	39 unit	39 unit	100%
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	9 unit	4 unit	2 unit	2 unit	100%	2 unit	2 unit	100%

		Dipelihara/Direhabilitasi								
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Status Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Minimal Madya	55,93%	89,47%	52,54%	94,91%	180,64%	100%	100%	100%
		Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	2,30 per 100000 penduduk	2,15 per 100000 penduduk	2,25 per 100000 penduduk	2,12 per 100000 penduduk	94,22%	2,25 per 100000 penduduk	2,25 per 100000 penduduk	100%
		Prevalensi Stunting (data EPPGBM)	13,6%	11,58%	14%	11,34%	123,46%	11%	11%	100%
		Angka Morbiditas	17,1%	23,23%	18,1%	18,78%	96,37%	17,6%	17,6%	100%
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan fasilitas pelayanan primer	100%	100%	100%	95,65%	95,65%	100%	100%	100%
		Presentase Puskesmas dan Rumah Sakit ketersediaan sarpas, alkes sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Rasio Puskesmas dan Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk	3,3 per 100000 penduduk	2,12 per 100000 penduduk	3,2 per 100000 penduduk	3,11 per 100000 penduduk	97,19%	3,3 per 100000 penduduk	3,3 per 100000 penduduk	100%
1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 unit	N/A	1 unit	1 unit	100%	N/A	N/A	N/A

1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 unit	1 unit	100%
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	260 unit	126 unit	13 unit	13 unit	100%	191 unit	191 unit	100%
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	25 unit	N/A	66 unit	60 unit	90,91%	2 unit	2 unit	100%
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	N/A	1 paket	2 paket	2 paket	100%	2 paket	2 paket	100%
1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	N/A	N/A	25000 keluarga	343393 keluarga	137,36%	25000 keluarga	25000 keluarga	100%
1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin,	22 paket	22 paket	22 paket	22 paket	100%	22 paket	22 paket	100%

		menular dan tidak menular yang terselenggara								
		Cakupan kasus KIPI yang yang dinvestigasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16214 orang	11849 orang	10529 orang	10529 orang	100%	12114 orang	12114 orang	100%
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16214 orang	12679 orang	11546 orang	11546 orang	100%	11781 orang	11781 orang	100%
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14589 Bayi	12513 orang	11545 orang	11545 orang	100%	11648 orang	11648 orang	100%
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	58.681 Balita	55129 orang	52820 orang	52820 orang	100%	52578 orang	52578 orang	100%
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	141976 Anak	141975 orang	141976 orang	141976 orang	100%	140225 orang	140225 orang	100%
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	604136 orang	637309 orang	669907 orang	669907 orang	100%	669907 orang	669907 orang	100%

1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	114718 orang	112334 orang	154605 orang	154605 orang	100%	131773 orang	131773 orang	100%
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	268926 orang	195979 orang	225689 orang	225689 orang	100%	236224 orang	236224 orang	100%
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	268926 orang	13114 orang	19124 orang	19124 orang	100%	14017 orang	14017 orang	100%
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	2471 Orang	2507 orang	2637 orang	2637 orang	100%	2634 orang	2634 orang	100%
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	10206 orang	13208 orang	14112 orang	14112 orang	100%	14086 orang	14086 orang	100%
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	17207 orang	17831 orang	17490 orang	17490 orang	100%	15076 orang	15076 orang	100%
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	3 dokumen	3 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	100%	3 dokumen	3 dokumen	100%

		Kesehatan Gizi Masyarakat								
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	3 dokumen	3 dokumen	100%
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	4 dokumen	100%
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	6 dokumen	6 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	100%	6 dokumen	6 dokumen	100%
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	23 dokumen	23 dokumen	23 dokumen	111 dokumen	482%	23 dokumen	23 dokumen	100%
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	138 orang	138 orang	138 orang	138 orang	100%	138 orang	138 orang	100%
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	890 orang	890 orang	890 orang	27 orang	3,03%	890 orang	890 orang	100%

1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	15 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	100%	15 dokumen	15 dokumen	100%
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	12 dokumen	100%
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	560 paket	560 paket	560 paket	681 paket	121,61%	560 paket	560 paket	100%
1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	9 dokumen	9 dokumen	8 dokumen	9 dokumen	112,5%	9 dokumen	9 dokumen	100%
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	23 dokumen	23 dokumen	22 dokumen	22 dokumen	100%	23 dokumen	23 dokumen	100%
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	26 dokumen	26 dokumen	26 dokumen	24 dokumen	92,31%	26 dokumen	26 dokumen	100%
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	15 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	40 dokumen	266%	15 dokumen	15 dokumen	100%
1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan	23 unit	23 unit	23 unit	22 unit	95,65%	23 unit	23 unit	100%

	Darurat Terpadu (SPGDT)	Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)								
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	40 dokumen	40 dokumen	40 dokumen	40 dokumen	100%	40 dokumen	40 dokumen	100%
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan rekomendasi izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dikeluarkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	100%	8 unit	8 unit	100%
1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata	54 unit	54 unit	54 unit	54 unit	100%	54 unit	54 unit	100%

[illegible]

1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	250 orang	71 orang	50 orang	0	0	50 orang	50 orang	100%
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	100 dokumen	264 dokumen	200 dokumen	200 dokumen	100%	200 dokumen	200 dokumen	100%
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Kesehatan yang memiliki sertifikasi tenaga kesehatan	95%	98,24%	92%	92%	100%	93%	93%	100%
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	189 orang	250 orang	189 orang	221 orang	116,93%	189 orang	189 orang	100%
01.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian yang memenuhi standar	64,44%	95,7%	54,55%	96,27%	176%	100%	100%	100%
		Persentase PIRT bersertifikat yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	40%	100%	36%	100%	277%	100%	100%	100%
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat,	Persentase rekomendasi	100%	100%	100%	88%	88%	100%	100%	100%

	Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	pemberian ijin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang dikeluarkan (Indikator lama)								
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	39 dokumen	70 lokasi	50 dokumen	53 dokumen	106%	39 dokumen	39 dokumen	100%
1.02.04.2.03	Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase rekomendasi pemberian ijin produksi Pangan Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Indikator lama)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin Produksi, untuk	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT	92 dokumen	200	150 dokumen	150 dokumen	100%	92 dokumen	92 dokumen	100%

	Produk Makanan Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga								
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Hasil pemeriksaan post market yang ditindaklanjuti (Indikator lama)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	154 unit	93 unit	93 unit	93 unit	100%	154 unit	154 unit	100%
01.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa / Kelurahan Sehat Mandiri	30,17%	33,4%	28,03%	37,7%	134,5%	41,1%	41,1%	100%
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase organisasi masyarakat yang mendapatkan penyuluhan melalui media promosi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan	13 dokumen	36 dokumen	13 dokumen	13 dokumen	100%	13 dokumen	13 dokumen	100%

	dan Pemberdayaan Masyarakat	dan Pemberdayaan Masyarakat								
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan RT yang ber PHBS	100%	92,20%	88%	94,7%	107,6%	100%	100%	100%
1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	5 dokumen	5 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	5 dokumen	5 dokumen	100%
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan desa sehat mandiri	30,17%	33,4%	28,03%	37,7%	134,5%	41,1%	41,1%	100%
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3 dokumen	15 dokumen	65 dokumen	65 dokumen	100%	3 dokumen	3 dokumen	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis
Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

No	Tujuan Strategis	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
1	2	3	4	5	7	8	9
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		Usia Harapan Hidup	Tahun	74	74,19	100,26%
		Menurunnya angka morbiditas dan mortalitas	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 KH	67,57	95,28	70,83%
			Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1000 KH	7,57	13,25	57,12%
			Angka Kematian Balita (AKBA)	Per 1000 KH	9,05	15,76	57,41%
			Indeks Keluarga Sehat	Nilai	0,50	0,62	124%
		Meningkatnya kapasitas sumber daya kesehatan	Rasio Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terhadap jumlah penduduk	Per 5000 penduduk	1,50	1,64	109,33%
			Rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk	Per 100.000 penduduk	337,9	350,51	103,73%
2	Meningkatnya kualitas kelembagaan DINKES		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Angka	39	40	102,57%
		Meningkatnya implementasi SAKIP DINKES	Nilai SAKIP DINKES	Angka	73,6	73,81	100,29%
Rata-rata Capaian Kinerja					91,73%		
Predikat Kinerja					Sangat Tinggi		

Penjelasan atas capaian masing-masing indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran sesuai dengan tabel tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tujuan I: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Merujuk kepada sasaran pembangunan bidang kesehatan yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 kemudian menjadi tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan indikator kinerja Usia Harapan Hidup.

Usia harapan Hidup sebagai indikator kualitas kesehatan dan kesejahteraan dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya kualitas lingkungan, kualitas Pelayanan kesehatan, pola hidup dan gaya hidup individu. Meningkatnya usia harapan hidup kemudian dapat berdampak pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Usia Harapan Hidup mengindikasikan derajat kesehatan masyarakat dimana mencerminkan tingkat keberhasilan pembangunan bidang kesehatan.

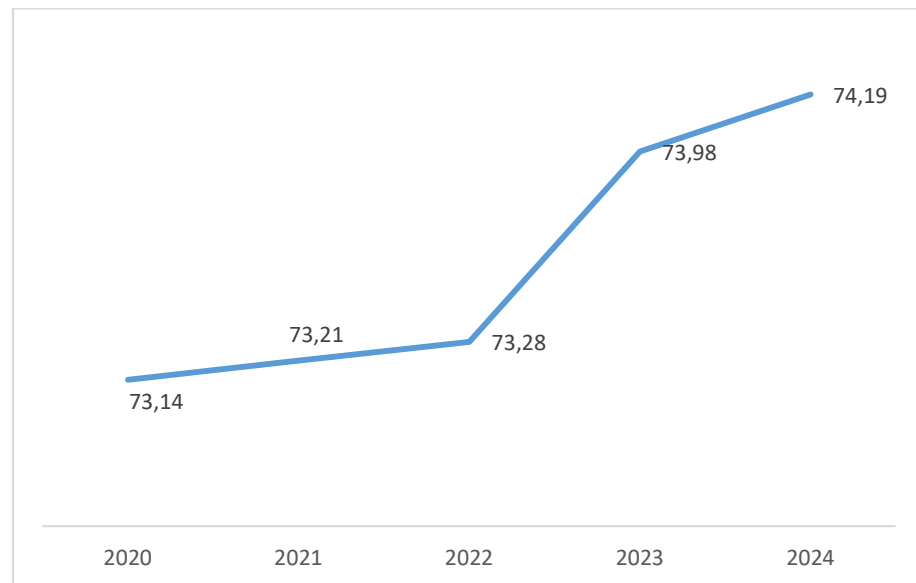
Hasil evaluasi tujuan strategis meningkatkan derajat kesehatan masyarakat mendapatkan capaian kinerja sebesar 100,26% dengan kategori Sangat Tinggi.

Usia Harapan Hidup Kabupaten Purbalingga pada tahun 2024 mencapai 74,19 tahun dari target yang ditetapkan yaitu 74 tahun dengan capaian kinerja 100,26% hal ini dapat dikatakan capaian kinerja Tujuan strategis Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat berada di kriteria **Sangat Tinggi**.

Usia Harapan Hidup penduduk Kabupaten Purbalingga dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Selama tahun 2020 hingga 2024 terjadi peningkatan UHH sebesar 1,05 tahun. Usia Harapan Hidup Kabupaten Purbalingga tahun 2024 menjadi 74,19 tahun, yang artinya pada tahun 2024 rata-rata umur bayi baru lahir diperkirakan akan hidup hingga 74,19 tahun. Capaian Kinerja jika dibandingkan terhadap Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 adalah 100,94%. Tetapi jika dibandingkan dengan Usia Harapan Hidup Provinsi Jawa Tengah masih berada dibawah capaian Usia Harapan Hidup yaitu 74,91, namun masih lebih tinggi dibandingkan capaian nasional yaitu 74,15 tahun.

Tren Usia Harapan Hidup penduduk Kabupaten Purbalingga selama lima tahun dapat dilihat dalam grafik dibawah ini:

Usia Harapan Hidup Penduduk Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Faktor yang menjadi kendala UHH Kabupaten Purbalingga lebih rendah dibandingkan dengan UHH Provinsi di antaranya:

a. Sarana prasarana kesehatan

Jumlah Puskesmas yang terdapat di Kabupaten Purbalingga sebanyak 22 unit yang terdiri dari Puskesmas Non Rawat Inap 11 unit dan Puskesmas Rawat Inap 11 unit. Pada tahun 2021 telah terbangun satu Puskesmas baru di Kecamatan Kemangkon, namun Puskesmas tersebut masih dalam tahap pemenuhan perijinan operasional dan pemenuhan sarana dan prasarananya. Sebagai dukungan terhadap pemerataan akses pelayanan kesehatan masyarakat di beberapa kecamatan terdapat puskesmas pembantu yang berjumlah 48 unit dan puskesmas keliling yang berjumlah 22 unit.

Dengan jumlah penduduk di Kabupaten Purbalingga tahun 2024 sebanyak 1.053.565 jiwa berarti 1 Puskesmas beserta jaringannya rata-rata melayani penduduk sebanyak 47.889 jiwa, atau rasionya adalah 2,1/100.000 penduduk. Jika mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat bahwa rasio penduduk untuk

setiap Puskesmas sebesar 1:30.000 penduduk maka untuk mencapai target tersebut berdasarkan jumlah penduduk tahun 2024 Kabupaten Purbalingga masih kekurangan 13 unit Puskesmas baru untuk mencapai kondisi ideal. Berbagai upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan jumlah Puskesmas seperti pembangunan Puskesmas baru maupun peningkatan status Puskesmas pembantu menjadi Puskesmas induk.

b. Banyaknya penduduk miskin

Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga, banyaknya penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga tahun 2024 sebesar 14,18%. Penduduk miskin cenderung memiliki akses terbatas terhadap Pendidikan dan informasi kesehatan, sehingga kurang mampu untuk mengadopsi gaya hidup sehat. Selain itu, kondisi ekonomi yang sulit juga dapat menyebabkan ketidakmampuan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas, termasuk pemeriksaan rutin dan pengobatan yang diperlukan.

c. Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu merupakan salah satu indikator penting dalam evaluasi kesehatan maternal di suatu wilayah. Pada tahun 2024, Angka Kematian Ibu di Kabupaten Purbalingga mencapai 95,28 per 100.000 kelahiran hidup. Jika dibandingkan dengan target Angka Kematian Ibu di Kabupaten Purbalingga yaitu 67,57 per 100.000 kelahiran hidup. Hal tersebut mencerminkan Angka Kematian Ibu di Kabupaten Purbalingga termasuk tinggi.

Kendala tersebut menjadi tantangan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam rangka mewujudkan tujuan yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dalam hal ini beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian Usia Harapan Hidup yaitu:

a. Layanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan merupakan faktor yang mempengaruhi kesehatan masyarakat, karena keberadaan fasilitas kesehatan sangat menentukan dalam pelayanan pencegahan terhadap penyakit, pemulihan kesehatan, pengobatan dan keperawatan serta kelompok masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan.

Berikut ini merupakan persebaran layanan kesehatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 sebagai berikut:

Layanan Kesehatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

URAIAN	2024
1	2
Rumah Sakit Umum	7
Rumah Sakit Bersalin	0
Rumah Sakit Ibu dan Anak	2
Klinik Utama	2
Klinik Pratama	22
Puskesmas rawat inap	11
Puskesmas non rawat inap	11
Puskesmas pembantu	48
Puskesmas keliling	22
PKD	191
Posyandu	1240
Posyandu lansia	764
Apotek	111
Laboratorium	3

b. Persebaran Tenaga Kesehatan

Untuk mencukupi kebutuhan tenaga kesehatan telah dilakukan pemenuhan kebutuhan dengan menempatkan pegawai yang diangkat oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi serta Kabupaten baik sebagai ASN, Pegawai Tidak tetap dan Tenaga honor daerah.

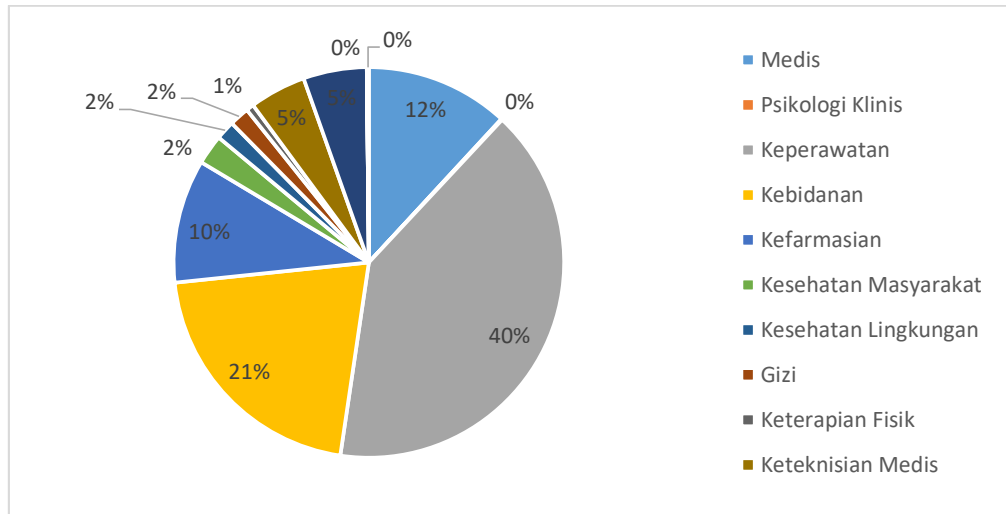
Berikut persebaran tenaga kesehatan menurut jenisnya adalah sebagai berikut:

Persebaran Tenaga Kesehatan berdasarkan jenisnya
Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

No	Jenis Ketenagaan	Jumlah
1	2	3
1	Medis	432
2	Psikologi Klinis	3
3	Keperawatan	1469
4	Kebidanan	764
5	Kefarmasian	372
6	Kesehatan Masyarakat	90
7	Kesehatan Lingkungan	57
8	Gizi	60
9	Keterapian Fisik	23
10	Keteknisian Medis	170

11	Teknik Biomedika	191
12	Kesehatan Tradisional	0
13	Nakes Lainnya	6
Jumlah		3637

Persebaran Tenaga Kesehatan Menurut Jenisnya Kabupaten Purbalingga Tahun 2024



Rasio Tenaga Kesehatan Tahun 2024

1) Rasio Dokter Spesialis per 100.000 Penduduk

Jumlah tenaga dokter spesialis di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2024 sejumlah 182 orang dengan rasio perbandingan dokter spesialis sebesar 17,27 per 100.000 penduduk. Artinya setiap 100.000 penduduk dilayani oleh 17 orang dokter spesialis. Rasio tersebut sudah sesuai target Indonesia Sehat sebesar 6 per 100.000 penduduk.

2) Rasio Dokter Umum per 100.000 Penduduk

Jumlah tenaga dokter umum yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan Kabupaten Purbalingga pada tahun 2024 sejumlah 213 orang dengan rasio perbandingan tenaga dokter umum sebesar 20,22 per 100.000 penduduk. Artinya setiap 100.000 penduduk dilayani oleh 20 orang dokter umum. Rasio tersebut masih jauh di bawah target Indonesia Sehat sebesar 40 per 100.000 penduduk.

Rasio Dokter Umum dan Dokter Spesialis Terhadap Jumlah Penduduk

Uraian	2024
1	2
Jumlah Dokter Umum	213
Jumlah Dokter Spesialis	182
Jumlah Penduduk	1.053.565
Rasio Dokter Umum (per 100.000 penduduk)	20,22
Rasio Dokter Spesialis (per 100.000 penduduk)	17,27

c. Pelaksanaan program Integrasi Pelayanan Primer (ILP)

Integrasi Pelayanan Primer (ILP) merupakan salah satu dari enam pilar transformasi bidang kesehatan di Indonesia. Integrasi Pelayanan Primer menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 2015 tahun 2023 adalah sebuah upaya untuk menata dan mengkoordinasikan berbagai Pelayanan kesehatan primer dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan Pelayanan kesehatan berdasarkan siklus hidup bagi perorangan, keluarga, dan masyarakat. Tujuan ILP untuk mendekatkan akses dan Pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan atau paliatif pada setiap fase kehidupan secara komprehensif dan berkualitas bagi masyarakat. Kabupaten Purbalingga sudah melaksanakan Integrasi Pelayanan Primer (ILP) di 22 Puskesmas yang ada di Kabupaten Purbalingga.

d. Pelaksanaan program pembangunan kesehatan

Pelaksanaan fisik program pembangunan kesehatan di Kabupaten Purbalingga tahun 2024 dalam meningkatkan akses dan kualitas terhadap pelayanan kesehatan diantaranya melakukan rehabilitasi pada Puskesmas Kemangkon II. Peningkatan sarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan dilakukan dengan pengadaan ambulance untuk Puskesmas Bukateja, Puskesmas Kemangkon, Puskesmas Mrebet, Puskesmas Pengadegan, Puskesmas Kalikajar. Pengadaan mobil siaga yang diserahkan ke Desa Bantarbarang, Desa Candiwulan, Desa Sumingkir, Desa Karangpucung, Desa Kedungbenda. Beserta pengadaan alat kesehatan yaitu *Cold Storage*.

e. Pelaksanaan program sosial khususnya kesehatan lingkungan

Program sosial terutama dalam bidang kesehatan lingkungan, bertujuan untuk menyediakan sarana sanitasi dasar yang layak bagi masyarakat. Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga telah melakukan stimulan jamban yaitu bantuan yang diberikan kepada masyarakat untuk membangun jamban sehat kepada 50 Kepala Keluarga di Kabupaten Purbalingga, hal ini bertujuan untuk meningkatkan akses sanitasi dan kesehatan masyarakat.

f. Pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin

Pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga merupakan suatu upaya yang sangat penting untuk memastikan bahwa setiap individu, memiliki akses yang setara dan terjangkau terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas melalui JKN. Seiring dengan program nasional Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga yang tercakup oleh Jaminan Kesehatan Nasional sebesar 1.052.030 atau 99,85% dari total penduduk 1.053.565 jiwa. Dari jumlah tersebut, 734.857 atau 69.85% merupakan peserta JKN bagi penduduk miskin. Realisasi tersebut sesuai dengan target capaian *Universal Health Coverage (UHC)* yaitu minimal 95% dari jumlah penduduk.

Kepsertaan Jaminan Kesehatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

Uraian	2024
1	2
BPJS	1.052.030
a. BPJS PBI	734.857
b. BPJS Non PBI	317.173

Pemerintah Kabupaten Purbalingga memperluas kebijakan jaminan perlindungan kesehatan dari penduduk miskin menjadi seluruh penduduk miskin Kabupaten Purbalingga dalam mencapai target *Universal Health Coverage (UHC)*. Anggaran JKN yang dibayarkan Kabupaten Purbalingga sebesar Rp.22.622.544.000,-, yang terdiri dari pembayaran PBI APBD sebesar Rp.21.110.544.000,- dan Rp.1.512.000.000,- untuk membayar bantuan iuran JKN peserta PBP dan BP kelas 3. Capaian UHC pada akhir tahun 2024 sebesar

99,85% dari total penduduk di Kabupaten Purbalingga, dimana 77,43% diantaranya adalah peserta aktif.

Berikut ini merupakan kepesertaan JKN tahun 2024 berdasarkan jenis kepesertaannya:

Kepesertaan JKN Berdasarkan Jenis Kepesetaannya Tahun 2024

Jenis Kepesertaan	2024
1	2
PBI APBN	651.681
PBI APBD dinkes	83.176
Bukan Pekerja	19.328
Pekerja Bukan Penerima Upah	91.532
Pekerja Penerima Upah Badan Usaha	155.613
Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara	50.700

g. Penanganan Angka Kematian Ibu (AKI)

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk menurunkan Angka Kematian Ibu diantaranya Coffee Morning Penurunan AKI AKB, Pertemuan bidan dengan pokok bahasan yang berbeda dalam rangka refreshing pengetahuan terkait program, refreshing kegawatdaruratan maternal dan neonatal, AMP internal di fasyankes dan Rumah Sakit.

h. Pelaksanaan GERMAS

Salah satu upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pemerintah Kabupaten Purbalingga telah mengadakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). Tujuan GERMAS diantaranya menurunkan risiko penyakit menular dan tidak menular yang menimbulkan kematian maupun kecacatan, menghindari terjadinya penurunan produktivitas penduduk dan pembiayaan pelayanan kesehatan karena meningkatnya penyakit. GERMAS dimulai dengan 3 fokus kegiatan yaitu meningkatkan aktivitas fisik, konsumsi sayur dan buah, serta

deteksi dini penyakit menular dan tidak menular. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka GERMAS adalah:

- 1) Peningkatan aktivitas fisik
- 2) Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
- 3) Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi
- 4) Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit
- 5) Peningkatan kualitas lingkungan
- 6) Peningkatan edukasi hidup sehat

2. Sasaran I: Menurunnya Angka Morbiditas dan Mortalitas

Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2024, indikator kinerja menurunnya angka morbiditas dan mortalitas yaitu : Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKBA), dan Indeks Keluarga Sehat.

a. Angka Kematian Ibu (AKI)

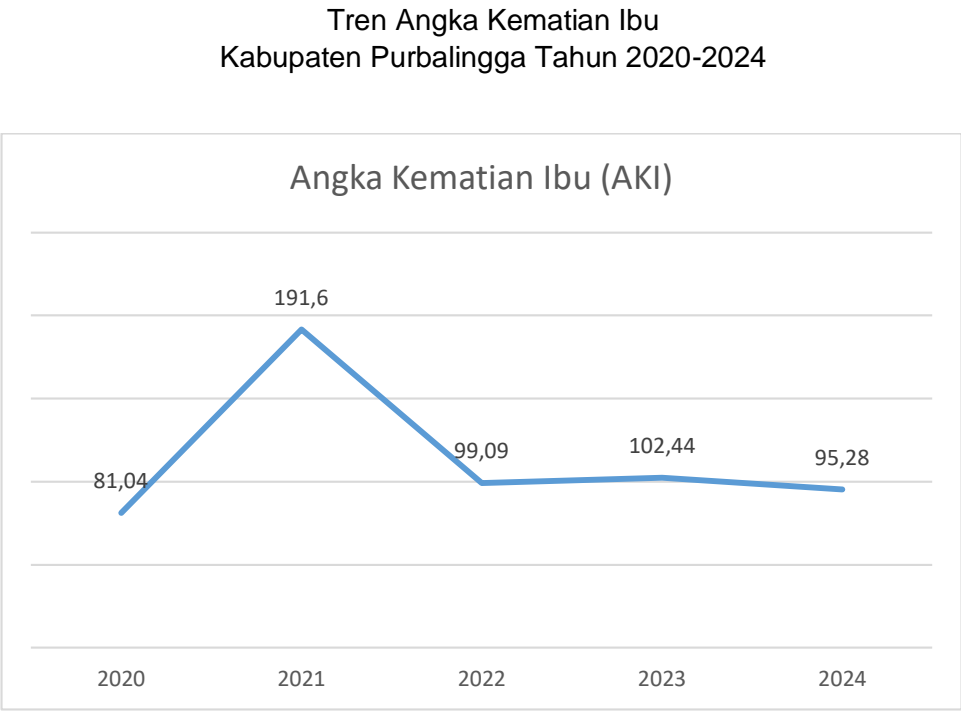
Angka Kematian Ibu mencerminkan risiko yang dihadapi oleh seorang ibu selama masa kehamilan sampai dengan pasca persalinan yang dipengaruhi oleh status gizi, keadaan sosial ekonomi, keadaan kesehatan yang kurang baik menjelang kehamilan, kejadian berbagai komplikasi pada kehamilan dan kelahiran, tersedianya dan pengguna fasilitas Pelayanan kesehatan termasuk Pelayanan prenatal dan obstetri.

Angka Kematian Ibu di Kabupaten Purbalingga tahun 2024 sebesar 95,28 per 100.000 kelahiran hidup dengan 11 kasus kematian ibu. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu 67,57 per 100.000 kelahiran hidup maka capaian Angka Kematian Ibu hanya mencapai 70,83% dan termasuk dalam kategori **Sedang**. Namun capaian ini lebih tinggi dari tahun lalu dengan angka kematian ibu 102,44 per 100.000 kelahiran hidup.

Capaian AKI di Kabupaten Purbalingga tercatat mengalami tren yang fluktuatif, dimana AKI mengalami kenaikan pada tahun 2021 dikarenakan masih berstatus pandemic covid, terjadi kenaikan capaian AKI pada tahun 2023 dikarenakan terjadi penurunan jumlah kelahiran hidup dari tahun 2022 ke 2023 tetapi jumlah kasusnya sama. Capaian kinerja jika dibandingkan terhadap Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 adalah

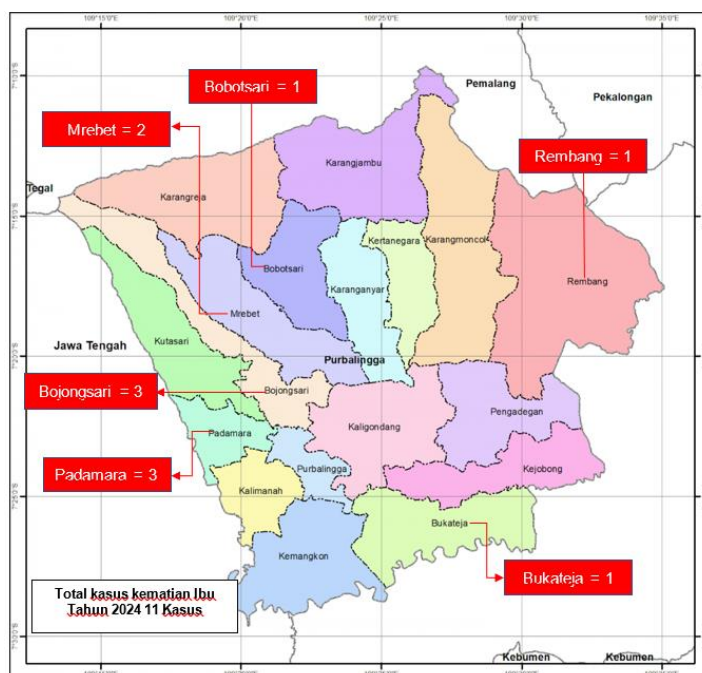
70,83% dengan target masa akhir Renstra adalah 67,57 per 100.000 kelahiran hidup.

Tren capaian AKI di Kabupaten Purbalingga dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:



Kasus kematian ibu di Kabupaten Purbalingga tahun 2024 sebanyak 11 kasus menempati posisi ke sepuluh kasus kematian ibu tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Sebaran kasus kematian ibu di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat dalam gambar dibawah ini:

Peta Sebaran Kasus Kematian Ibu Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

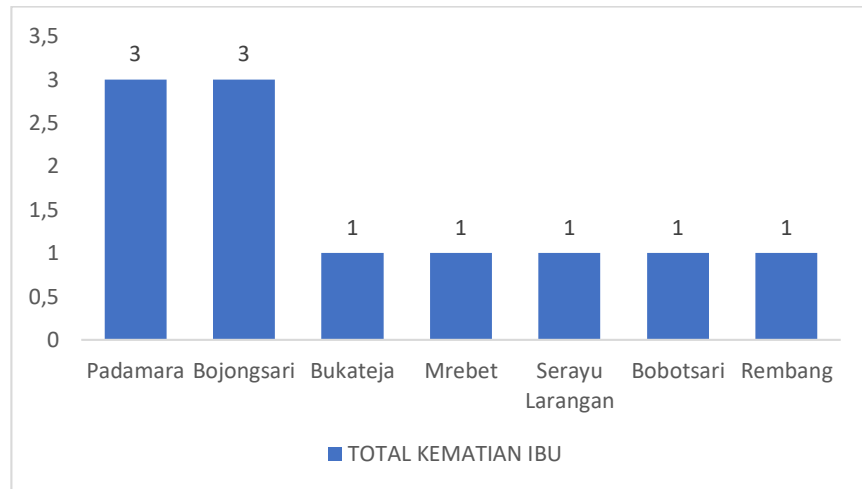


Kabupaten Purbalingga memiliki 18 Kecamatan. Kecamatan Bojongsari dan Kecamatan Padamara merupakan kecamatan dengan penyumbang kasus kematian ibu, yaitu sebanyak tiga kasus kematian.

Kabupaten Purbalingga memiliki 22 Puskesmas yang tersebar di 18 kecamatan. Jumlah kematian ibu terdapat di Puskesmas Bojongsari dan Puskesmas Padamara sebanyak masing-masing 3 kasus. Puskesmas dengan catatan 1 kasus kematian yaitu Puskesmas Bukateja, Puskesmas Mrebet, Puskesmas Serayu Larangan, Puskesmas Bobotsari, Puskesmas Rembang dan sisanya tidak ada kasus kematian.

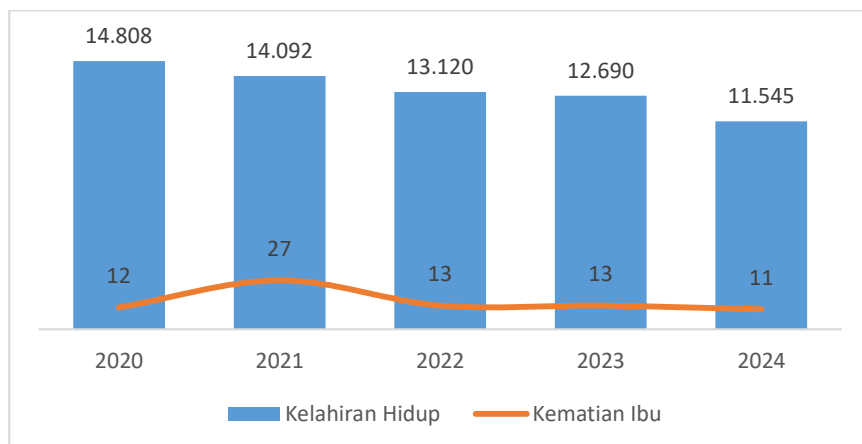
Penyebab kematian ibu adalah perdarahan 4 kasus, jantung 3 kasus, PEB/Eklampsia 2 kasus, penyakit TBC 1 kasus dan DBD 1 kasus. Tempat kematian 11 di Rumah Sakit. Sebanyak 9 kasus meninggal di Rumah Sakit di Purbalingga dan 2 kasus meninggal di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo.

Total Kematian Ibu Berdasarkan Puskesmas Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024



Kasus kematian ibu di Kabupaten Purbalingga tahun 2024 masih tergolong tinggi di antara Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, sehingga sampai saat ini masih menjadi perhatian khusus Pemerintah Daerah dalam penanganannya secara komprehensif melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga. Tren kasus kematian ibu dan kelahiran hidup di Kabupaten Purbalingga selama lima tahun terakhir dapat dilihat dalam grafik dibawah ini:

Tren Kasus Kematian Ibu dan Kelahiran Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024



Berdasarkan grafik diatas diketahui jumlah kasus kematian ibu tertinggi di tahun 2021 yaitu sebanyak 27 kasus. Kematian di tahun 2021 sebagian besar disebabkan oleh infeksi COVID-19, penyebab utama selain COVID-19 adalah Hipertensi dalam kehamilan. Tren kasus kematian ibu dari tahun 2022 hingga 2024 mengalami penurunan hal ini berbanding lurus dengan jumlah kelahiran hidup yang menurun setiap tahunnya.

Beberapa kendala yang dihadapi pada saat upaya penurunan Angka Kelahiran Ibu antara lain:

- 1) Masih ada kasus kematian ibu yang terjadi karena keterlambatan rujukan Rumah Sakit Non Ponek ke Rumah Sakit Ponek / Ponek Utama
- 2) Koordinasi internal Rumah Sakit untuk kasus ibu hamil risti masih terkotak kotak pada Pelayanan di masing-masing poli
- 3) Pembiayaan BPJS terbatas untuk 1 Pelayanan poli dalam 1 hari sehingga menghambat rujukan internal di Rumah Sakit
- 4) Rekomendasi AMPSR belum ditindaklanjuti secara optimal
- 5) Kurang peran aktif lintas sektor terhadap kegiatan penurunan kematian ibu, bayi dan balita, terutama tindak lanjut dari ditemukannya ibu hamil risti.
- 6) Peran Tim Pokja Penurunan AKI AKB belum optimal, karena tidak semua anggota tim berpartisipasi aktif saat pembahasan masalah
- 7) Adanya ibu hamil dan remaja putri yang tidak mengkonsumsi TTD

Beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam penurunan Angka Kematian Ibu di antaranya sebagai berikut:

- 1) Perlu adanya peningkatan Pelayanan di Tingkat RS dari semua lini dan peningkatan kompetensi SDM dalam penegakan diagnosa agar penggunaan manual rujukan lebih optimal
- 2) Perlu adanya review SOP untuk penanganan kasus yang melibatkan beberapa poli di RS
- 3) Perlu ada monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi AMPSR
- 4) Meningkatkan advokasi dan koordinasi terhadap lintas sektor terkait dengan kegiatan penurunan kematian Ibu, bayi dan balita

- 5) Penguatan komitmen peran dan tanggung jawab setiap anggota Tim Pokja Penurunan AKI AKB
- 6) Meningkatkan peran Masyarakat (kader dan tokoh masyarakat) dalam melakukan pendekatan kepada sasaran
- 7) Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam penanganan kegawatdaruratan maternal Neonatal dengan sistem drill baik secara mandiri oleh faskes maupun pendampingan dari dokter spesialis dan tim
- 8) Meningkatkan sistem komunikasi dalam rujukan kasus gawat darurat
- 9) Meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang KIA, Kespro dan persiapan kehamilan kepada Remaja, PUS dan WUS baik di tingkat Kabupaten sampai ke Desa (RT/RW)
- 10) Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas puskesmas mampu persalinan dan Poned
- 11) Meningkatkan capaian skrining layak ibu hamil pada semua Catin dan PUS dengan mengoptimalkan peran kader dalam berbagai pertemuan di tingkat desa
- 12) Melakukan skrining EKG pada semua ibu hamil dan hasil EKG dibaca oleh yang berkompeten
- 13) Pemeriksaan USG di Puskesmas untuk skrining, bukan untuk diagnostik
- 14) Ibu hamil dengan anemia dilakukan pemeriksaan tindak lanjut oleh dokter.

Strategi tersebut diimplementasikan dalam program kerja Dinas Kesehatan dalam upaya mencapai target indikator meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Program yang bersifat langsung untuk menurunkan Angka Kematian Ibu adalah program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat di dalamnya ada kegiatan penyediaan pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP dengan sub kegiatan bertujuan untuk penurunan AKI di antaranya Pelayanan kesehatan ibu hamil, Pelayanan kesehatan ibu bersalin, Pelayanan kesehatan ibu dan anak, Pelayanan jaminan kesehatan.

b. Angka Kematian Bayi (AKB)

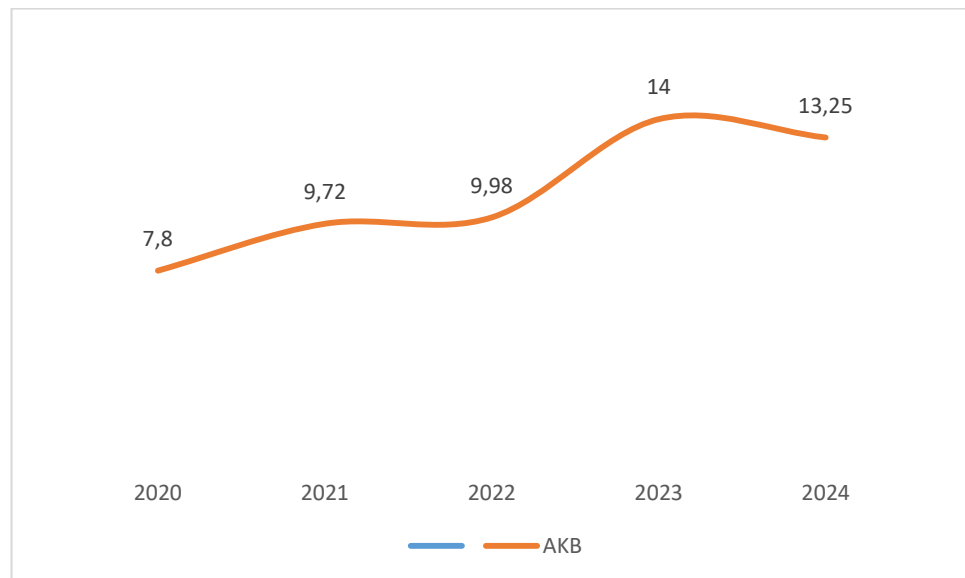
Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan jumlah bayi yang meninggal sebelum berusia satu tahun per 1.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Bayi digunakan untuk mencerminkan derajat kesehatan masyarakat. Angka Kematian Bayi menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB, serta kondisi lingkungan dan sosial ekonomi.

Angka kematian bayi di Kabupaten Purbalingga tahun 2024 sebesar 13,25 per 1.000 kelahiran hidup dengan 153 kasus kematian bayi. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu 7,57 per 1.000 kelahiran hidup maka capaian Angka Kematian Bayi hanya mencapai 57,12% dan termasuk dalam kategori **Sedang**. Namun capaian ini lebih tinggi dari tahun lalu dengan angka kematian bayi 14,00 per 1.000 kelahiran hidup dengan kematian 178 kasus.

Angka Kematian Bayi di Kabupaten Purbalingga tercatat mengalami tren yang fluktuatif, dimana AKB mengalami kenaikan pada tahun 2020 hingga tahun 2023, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2024. diketahui AKB tahun 2020 hingga 2023 menunjukkan kenaikan tiap tahunnya. Peningkatan ekstrim terjadi pada tahun 2023, hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain adanya perubahan metode pelaporan yaitu menggunakan sistem *Maternal Perinatal Death* (MPDN) yaitu sistem berbasis fasilitas Pelayanan kesehatan sehingga seluruh kematian bayi di fasyankes manapun akan ternotifikasi dan tercatat dalam sistem apabila orang tua memiliki KTP Kabupaten Purbalingga walaupun kematian terjadi di Kabupaten lain. Perbaikan pelaporan ini menyediakan data yang lebih akurat dan menyeluruh sehingga menyebabkan catatan kasus kematian bayi menjadi naik. Selain itu, kematian bayi yang naik dipengaruhi oleh naiknya kasus BBLR pada kelahiran bayi. Namun dari grafik tren lima tahun terakhir terjadi penurunan dari tahun 2023 ke tahun 2024 yaitu Angka Kematian Bayi menjadi 13,25 per 1.000 kelahiran hidup dengan jumlah 153 kasus. Capaian kinerja jika dibandingkan dengan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 adalah 56,07% dengan target masa akhir Renstra adalah 7,43 per 1.000 kelahiran hidup.

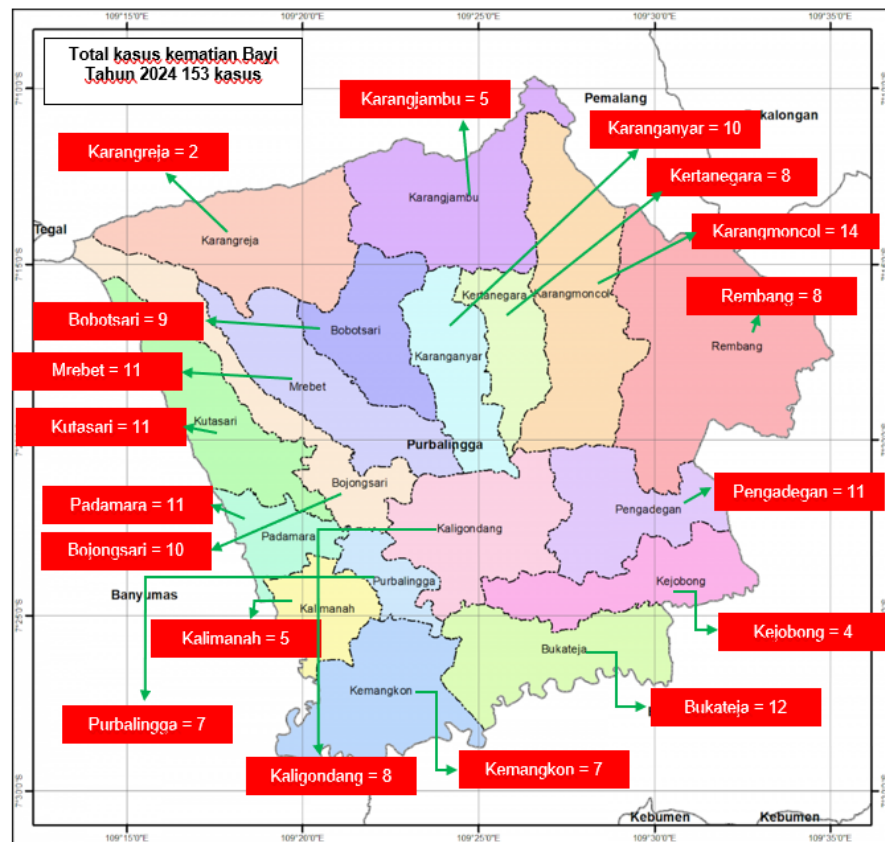
Tren capaian AKB di Kabupaten Purbalingga dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

Tren Angka Kematian Bayi
Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024



Kasus kematian bayi di Kabupaten Purbalingga tahun 2024 sebanyak 153 kasus dengan jumlah kematian neonatal (0-28 hari) sebanyak 116 kasus dan kematian bayi (29 hari-11 bln) sebanyak 37 kasus. Sebaran kasus kematian bayi di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat dalam gambar berikut :

Peta Sebaran Kasus Kematian Bayi Kabupaten Purbalingga Tahun 2024



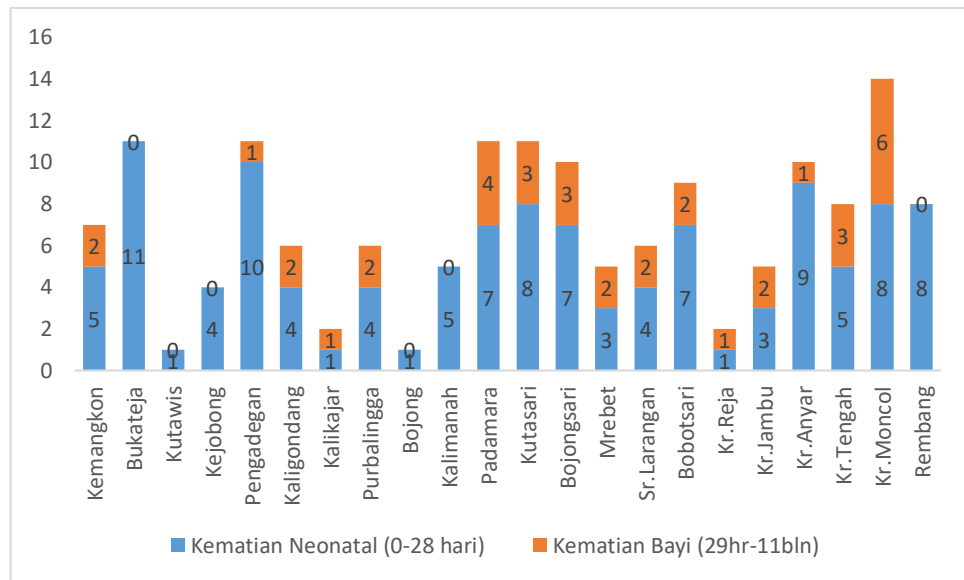
Kabupaten Purbalingga memiliki 18 kecamatan. Kecamatan Karangmoncol merupakan kecamatan dengan penyumbang kasus kematian bayi tertinggi yaitu sebanyak 14 kasus. Dari 22 Puskesmas yang ada di Kabupaten Purbalingga jumlah kematian bayi tertinggi terdapat di Puskesmas Karangmoncol dengan jumlah 14 kasus dan Kematian bayi terendah terdapat di Puskesmas Bojong dan Puskesmas Kutawis dengan jumlah 1 kasus kematian bayi.

Berikut ini jumlah kematian bayi per wilayah Puskesmas di Kabupaten Purbalingga tahun 2024:

Total Kematian Bayi Berdasarkan Puskesmas
Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

No	Puskesmas	Total Kematian Bayi		
		Kematian Neonatal (0-28hr)	Kematian Bayi (29hr – 11 bln)	Total
1	2	3	4	5
1	Puskesmas Kemangkon	5	2	7
2	Puskesmas Bukateja	11	0	11
3	Puskesmas Kutawis	1	0	1
4	Puskesmas Kejobong	4	0	4
5	Puskesmas Pengadegan	10	1	11
6	Puskesmas Kaligondang	4	2	6
7	Puskesmas Kalikajar	1	1	2
8	Puskesmas Purbalingga	4	2	6
9	Puskesmas Bojong	1	0	1
10	Puskesmas Kalimanah	5	0	5
11	Puskesmas Padamara	7	4	11
12	Puskesmas Kutasari	8	3	11
13	Puskesmas Bojongsari	7	3	10
14	Puskesmas Mrebet	3	2	5
15	Puskesmas Serayu Larangan	4	2	6
16	Puskesmas Bobotsari	7	2	9
17	Puskesmas Karangreja	1	1	2
18	Puskesmas Karangjambu	3	2	5
19	Puskesmas Karanganyar	9	1	10
20	Puskesmas Karangtengah	5	3	8
21	Puskesmas Karangmoncol	8	6	14
22	Puskesmas Rembang	8	0	8
Jumlah		116	37	153

Total Kematian Bayi Berdasarkan Puskesmas Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024



Beberapa penyebab kematian yang terjadi pada usia 0-28 hari di antaranya BBLR sebanyak 46 kasus, asfiksia sebanyak 12 kasus, kelainan kongenital sebanyak 24 kasus, kelainan jantung sebanyak 11 kasus dan penyebab lainnya seperti RDS, Gerd, tumor paru, kelainan usus, gagal nafas. Kematian bayi usia 29 hari – 11 bulan disebabkan karena pneumonia sebanyak 5 kasus, kelainan jantung sebanyak 7 kasus, kelainan kongenital sebanyak 2 kasus, diare sebanyak 2 kasus, meningitis sebanyak 2 kasus, dan penyebab lainnya seperti leukemia, thypoid, kejang demam, TB organ lain, sepsis.

Kendala-kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan upaya penurunan Angka Kematian Bayi antara lain:

- 1) Masih ditemukan 8,2% bayi dengan BBLR
- 2) KEK pada ibu hamil sebesar 16,49% yang berisiko melahirkan bayi prematur / BBLR
- 3) Tatalaksana MTBM pada bayi muda belum optimal dilakukan pada kunjungan neonatus
- 4) Belum semua Rumah sakit melakukan AMP pada kasus kematian bayi
- 5) Kurangnya peran lintas sektor pada upaya penurunan AKB

Solusi penyelesaian masalah antara lain sebagai berikut:

- 1) Deteksi dini dan monitoring tindak lanjut pada ibu hamil dengan risiko IUGR
- 2) Pemberian dan pemantauan asupan nutrisi yang adekuat bagi ibu hamil
- 3) Peningkatan kapasitas bidan desa dalam tata laksana MTBM saat kunjungan neonatus
- 4) Melakukan refreshing AMPSR pada FKTL
- 5) Perlu adanya penguatan komitmen peran dan tanggung jawab setiap anggota Tim Pokja Penurunan AKI AKB

Strategi dalam upaya penurunan AKB merupakan satu kesatuan dengan upaya penurunan AKI yaitu Peningkatan kesehatan ibu, bayi, anak, remaja dan usila melalui upaya-upaya sebagaimana telah disebutkan pada bagian sebelumnya. Program yang dilaksanakan dalam upaya penurunan AKB yaitu Program Pelayanan KIA, Remaja, dan Usia Lanjut melalui kegiatan-kegiatan Fasilitas Upaya Penurunan Kematian Ibu dan Bayi dan Peningkatan Pelayanan KIA, Remaja dan Usia Lanjut.

c. Angka Kematian Balita (AKBA)

Angka Kematian Balita (AKBA) merupakan jumlah kematian balita 0-15 tahun di satu wilayah per 1.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. Kematian balita di dalamnya mencakup jumlah kematian bayi umur 0-11 bulan. Angka Kematian Balita menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan balita, tingkat pelayanan KIA/Posyandu dan kondisi sanitasi lingkungan.

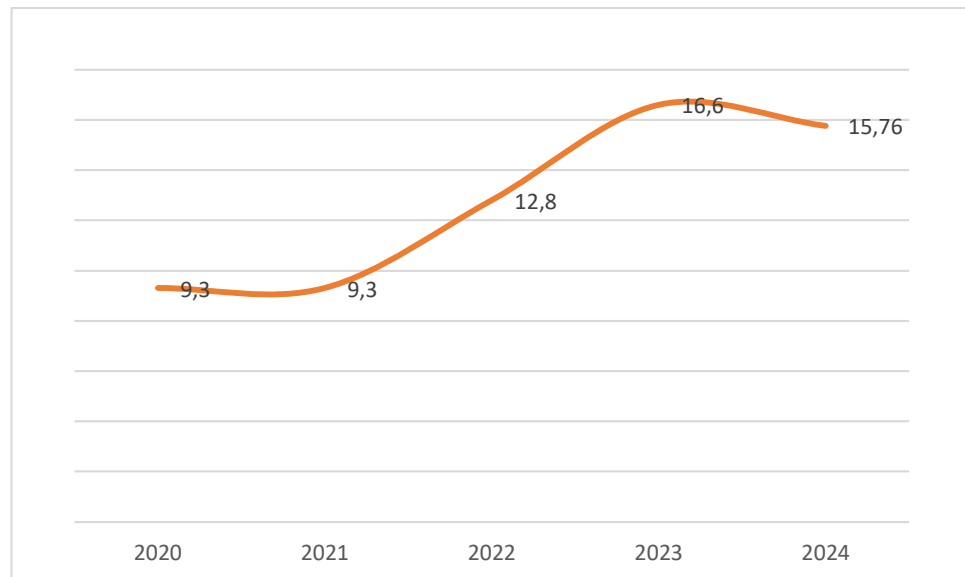
Angka Kematian Balita di Kabupaten Purbalingga tahun 2024 sebesar 15,76 per 1.000 kelahiran hidup dengan 182 kasus kematian. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu 9,05 per 1.000 kelahiran hidup maka capaian Angka Kematian Balita mencapai 54,71% dan termasuk dalam kategori **Sedang**. Namun capaian ini lebih tinggi dari tahun lalu dengan Angka Kematian Balita tahun 2023 sebesar 16,6 per 1.000 kelahiran hidup dengan 211 kasus kematian.

Angka Kematian Balita di Kabupaten Purbalingga tercatat mengalami tren yang fluktuatif, dimana AKB mengalami kenaikan pada tahun 2020 hingga tahun 2023, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2024. Capaian kinerja

jika dibandingkan terhadap Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 adalah 56,60% dengan target masa akhir Renstra adalah 8,92 per 1.000 kelahiran hidup. Diketahui AKBA tahun 2020 hingga 2023 menunjukan kenaikan tiap tahunnya. Peningkatan ekstrim terjadi pada tahun 2023, hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain adanya perubahan metode pelaporan yaitu menggunakan sistem Maternal Perinatal Death (MPDN) yaitu sistem berbasis fasilitas Pelayanan kesehatan sehingga seluruh kematian bayi di fasyankes manapun akan ternotifikasi dan tercatat dalam sistem apabila orang tua memiliki KTP Kabupaten Purbalingga walaupun kematian terjadi di Kabupaten lain. Perbaikan pelaporan ini menyediakan data yang lebih akurat dan menyeluruh sehingga menyebabkan catatan kasus kematian balita menjadi naik. Namun dari grafik tren lima tahun terakhir terjadi penurunan dari tahun 2023 ke tahun 2024 yaitu Angka Kematian Balita menjadi 15,76 per 1.000 kelahiran hidup dengan jumlah 182 kasus.

Tren capaian AKBA di Kabupaten Purbalingga dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

Tren Angka Kematian Balita
Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024



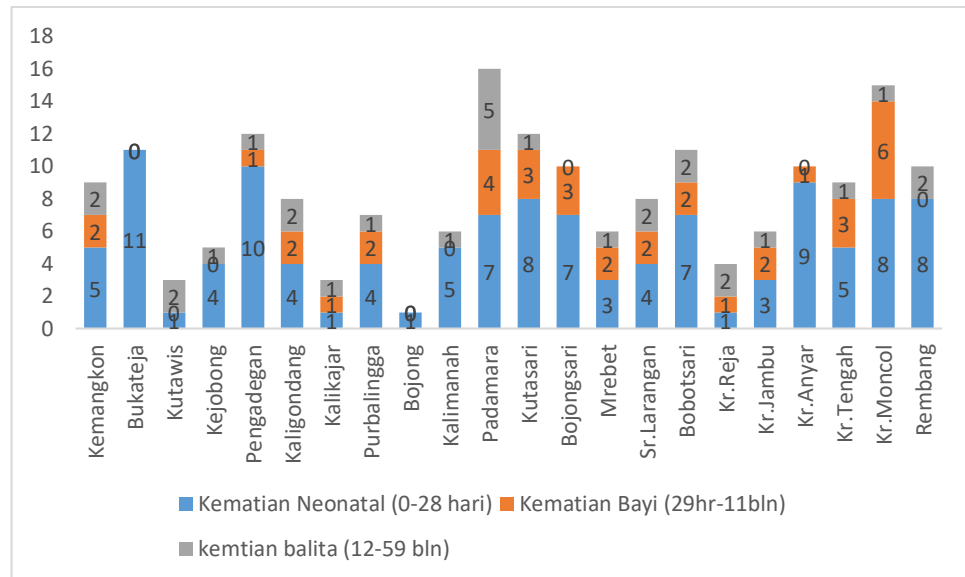
Kasus kematian balita (AKBA) di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 sebanyak 182 kasus dengan jumlah kasus kematian balita usia 12-59 bulan sebanyak 29 kasus. Dari 22 Puskesmas di Kabupaten Purbalingga jumlah kematian balita keseluruhan yang tertinggi terdapat di Puskesmas Padamara dengan jumlah 16 kasus dan kematian balita terendah terdapat di Puskesmas Bojong dengan jumlah 1 kasus kematian.

Berikut ini jumlah kematian balita per wilayah Puskesmas di Kabupaten Purbalingga tahun 2024:

Total Kematian Balita Berdasarkan Puskesmas
Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

No	Puskesmas	Total Kematian Balita			
		Kematian Neonatal (0-28hr)	Kematian Bayi (29hr – 11 bln)	Kematian Balita (12-59 bln)	Total
1	2	3	4	5	6
1	Puskesmas Kemangkon	5	2	2	9
2	Puskesmas Bukateja	11	0	0	11
3	Puskesmas Kutawis	1	0	2	3
4	Puskesmas Kejobong	4	0	1	5
5	Puskesmas Pengadegan	10	1	1	12
6	Puskesmas Kaligondang	4	2	2	8
7	Puskesmas Kalikajar	1	1	1	3
8	Puskesmas Purbalingga	4	2	1	7
9	Puskesmas Bojong	1	0	0	1
10	Puskesmas Kalimanah	5	0	1	6
11	Puskesmas Padamara	7	4	5	16
12	Puskesmas Kutasari	8	3	1	12
13	Puskesmas Bojongsari	7	3	0	10
14	Puskesmas Mrebet	3	2	1	6
15	Puskesmas Serayu Larangan	4	2	2	8
16	Puskesmas Bobotsari	7	2	2	11
17	Puskesmas Karangreja	1	1	2	4
18	Puskesmas Karangjambu	3	2	1	6
19	Puskesmas Karanganyar	9	1	0	10
20	Puskesmas Karangtengah	5	3	1	9
21	Puskesmas Karangmoncol	8	6	1	15
22	Puskesmas Rembang	8	0	2	10
Jumlah		116	37	29	182

Total Kematian Balita Berdasarkan Puskesmas Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024



Beberapa penyebab kematian yang terjadi pada usia 12-59 bulan yaitu disebabkan oleh pneumonia sebanyak 3 kasus, diare sebanyak 1 kasus, DBD sebanyak 2 kasus, kelainan kongenital jantung sebanyak 6 kasus, kelainan kongenital lainnya sebanyak 1 kasus, 16 kematian lainnya disebabkan oleh benjolan kepala, leukimia, kejang, ISPA, demam, meningitis, suspek ICH, syok hipovolemik, gagal nafas.

Kendala-kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan upaya penurunan Angka Kematian Balita antara lain:

- 1) Penangan MTBS yang dilakukan di Puskesmas belum optimal, penanganan balita sakit belum semua dilaksanakan sesuai tata laksana
- 2) 8 Puskesmas belum melaksanakan kalakarya MTBS
- 3) Masih ditemukan 12 kasus penyakit menular yang berpengaruh terhadap kematian balita
- 4) Pelaksanaan SDIDTK belum optimal, belum semua balita terpantau tumbuh kembangnya dengan baik karena fasilitas SDIDTK kurang memadai
- 5) Belum semua nakes memahami dan menggunakan buku KIA dengan

benar, karena setiap 2 tahun terdapat revisi buku KIA

- 6) Peran lintas sektor dalam upaya penurunan AKB masih kurang optimal
- 7) Kurang pengawasan, pemantauan dan Analisis masalah di Puskesmas
- 8) Kurang komitmen Bersama Rumah Sakit dan jejaring sistem rujukan
- 9) Persamaan persepsi antara dokter dalam penanganan kegawatdaruratan

Solusi penyelesaian masalah antara lain sebagai berikut:

- 1) Supervisi pelaksanaan MTBS di Puskesmas
- 2) Melaksanakan kalakarya MTBS pada 8 Puskesmas
- 3) Meningkatkan peran bidan desa dan kader dalam monitoring tindak lanjut tata laksana pada balita dengan penyakit menular dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular terutama yang sangat rentan terhadap usia balita
- 4) Optimalisasi pelaksanaan kegiatan SDIDTK dengan peningkatan kompetensi bidan melalui pelatihan SDIDTK dan pemenuhan fasilitas penunjang kegiatan SDIDTK secara bertahap
- 5) Optimalisasi peran lintas sektor dalam upaya penurunan AKBA
- 6) Koordinasi rutin yang melibatkan semua pihak yang terkait dalam analisis pencegahan kematian balita

d. Indeks Keluarga Sehat

Pengukuran Indeks Kesehatan Keluarga atau Indeks Keluarga Sehat (IKS) dilakukan melalui Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK). Pengukuran dilakukan melalui 12 indikator yaitu: Kepesertaan KB, Persalinan Faskes, Status Imunisasi, ASI Eksklusif, Pemantauan Pertumbuhan Balita, TB, Hipertensi, ODGJ, Anggota Keluarga yang Merokok, Kepesertaan JKN, serta Akses terhadap Air Bersih dan Jamban Keluarga.

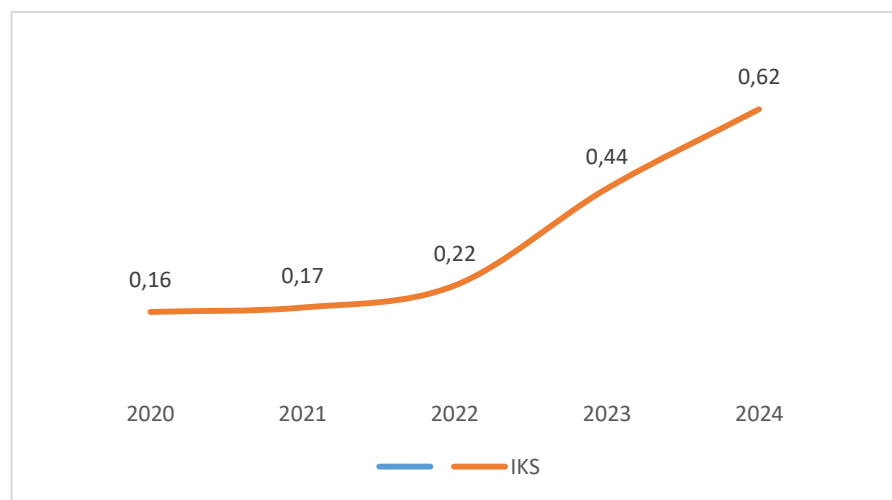
capaian Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Purbalingga tahun 2024 mencapai angka 0,62. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu 0,50 maka IKS Kabupaten Purbalingga sudah melebihi target yang ditetapkan dengan capaian 124% dan termasuk dalam kategori **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan angka IKS tahun 2023 yaitu 0,44 maka terdapat kenaikan

angka IKS sebanyak 0,18. Dengan capaian rata IKS yaitu 0,62 maka Kabupaten Purbalingga mencapai status pra sehat.

Capaian Indeks Keluarga Sehat Kabupaten dari Tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan signifikan dimulai pada Tahun 2023, jika sebelumnya kenaikan hanya sebesar 0,01 per tahun, pada Tahun 2023 ada lonjakan kenaikan IKS sebesar 0,22, dari Capaian IKS 0,22 pada Tahun 2022 menjadi 0,44 pada Tahun 2023, sedangkan kenaikan dari Tahun 2023 ke Tahun 2024 sebesar 0,18 dari IKS 0,44 di Tahun 2023 menjadi 0,62 Tahun 2024. Capaian kinerja jika dibandingkan terhadap Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 adalah 295,2% dengan target masa akhir Renstra adalah 0,21.

Tren capaian Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Purbalingga dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut:

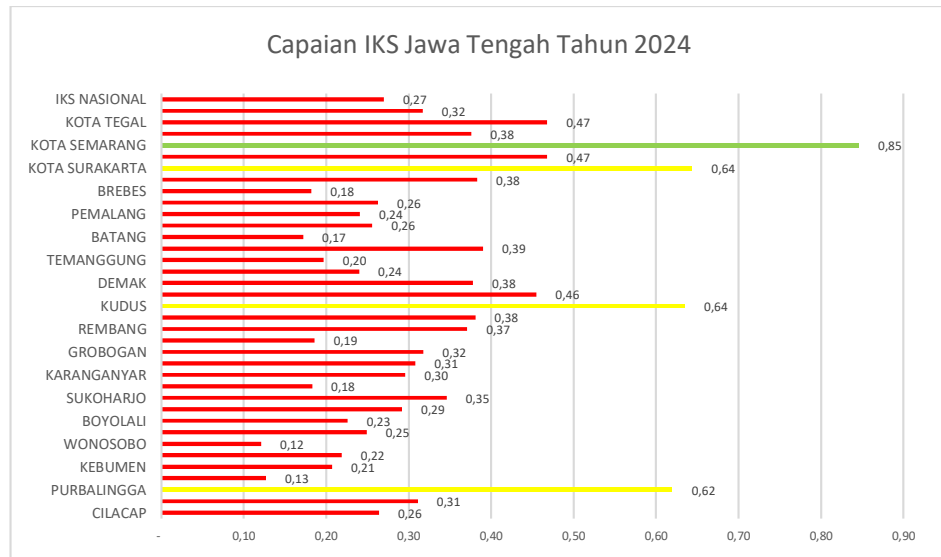
Tren Indeks Keluarga Sehat (IKS)
Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024



Capaian kinerja program PIS-PK Kabupaten Purbalingga jika dibandingkan dengan capaian IKS rata-rata Provinsi Jawa tengah sudah di atas rata-rata capaian di Provinsi Jawa Tengah yang berada di angka 0,32. Kabupaten Purbalingga menduduki peringkat ke 4 dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Begitu pula jika dibandingkan dengan capaian IKS Nasional, capaian IKS kabupaten Purbalingga sudah pada angka yang lebih tinggi, dimana IKS Nasional baru mencapai angka 0,27.

Capaian Indeks Keluarga Sehat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

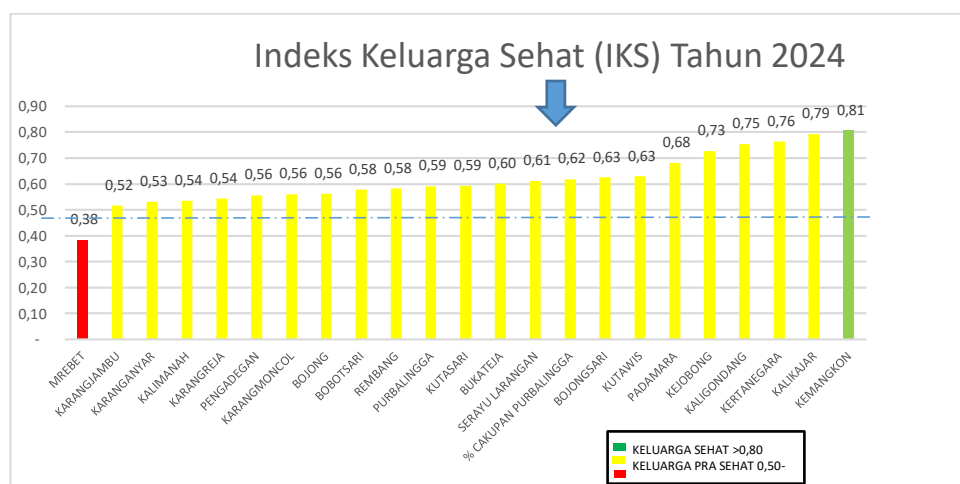


Capaian Indeks Keluarga Sehat Berdasarkan Puskesmas Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

No	Puskesmas	Nilai IKS
1	2	3
1	Puskesmas Mrebet	0,38
2	Puskesmas Karangjambu	0,52
3	Puskesmas Karanganyar	0,53
4	Puskesmas Kalimanah	0,54
5	Puskesmas Karangreja	0,54
6	Puskesmas Pengadegan	0,56
7	Puskesmas Karangmoncol	0,56
8	Puskesmas Bojong	0,56
9	Puskesmas Bobotsari	0,58
10	Puskesmas Rembang	0,58
11	Puskesmas Purbalingga	0,59
12	Puskesmas Kutasari	0,59

13	Puskesmas Bukateja	0,60
14	Puskesmas Serayu Larangan	0,61
15	Puskesmas Bojongsari	0,63
16	Puskesmas Kutawis	0,63
17	Puskesmas Padamara	0,68
18	Puskesmas Kejobong	0,73
19	Puskesmas Kaligondang	0,75
20	Puskesmas Karangtengah	0,76
21	Puskesmas Kalikajar	0,79
22	Puskesmas Kemangkon	0,81
	Cakupan Kabupaten	0,62

Capaian Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Purbalingga Tahun 2024



Berdasarkan grafik diatas, capaian IKS tertinggi pada Puskesmas Kemangkon dengan IKS 0,81 dan terendah di Puskesmas Mrebet dengan IKS 0,38. Dilihat dari rata-rata kabupaten, sebagian Puskesmas masih berada dibawah nilai rata-rata Kabupaten.

Untuk intervensi IKS rata-rata Puskesmas di Kabupaten Purbalingga yaitu sebanyak 20 Puskesmas masuk dalam kategori Keluarga Pra Sehat dengan capaian IKS 0,62. 1 Puskesmas dalam Kategori IKS Sehat dengan IKS 0,81 yaitu Puskesmas Kemangkon; dan 1 Puskesmas dalam Kategori Tidak Sehat dengan IKS 0,38 yaitu Puskesmas Mrebet.

Faktor keberhasilan capaian indeks keluarga sehat melebihi target yang ditetapkan adalah petugas Puskesmas yang rajin melakukan kunjungan keluarga dan langsung di input di aplikasi PIS-PK.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja indeks keluarga sehat diantaranya:

- 1) Pelaporan belum terintegrasi dengan kunjungan / kegiatan yang dilakukan oleh program
- 2) Belum melakukan intervensi secara berkelanjutan

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi sebagai berikut:

- 1) Melakukan koordinasi dan intervensi bersama sama dengan program
- 2) Percepatan update data

Kegiatan pendukung PIS-PK berupa Pertemuan Koordinasi Terintegrasi Lintas Program di Dinas Kesehatan dan Lintas Sektor terkait 12 Indikator Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga serta Pertemuan Teknis Terintegrasi Lintas Program dan Puskesmas dengan narasumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten dan *best practice* dari Puskesmas dengan Capaian IKS tertinggi serta Kegiatan Pembinaan / Monev PIS-PK yang dilaksanakan terintegrasi dengan Kegiatan Tim Pembina Cluster Binaan (TPCB).

3. Sasaran II: Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Kesehatan

Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2024, indikator kinerja menurunnya angka morbiditas dan mortalitas yaitu : Rasio Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terhadap jumlah penduduk, Rasio Tenaga Kesehatan terhadap jumlah penduduk.

a. Rasio Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Terhadap Jumlah Penduduk

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.

Cakupan rasio Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terhadap jumlah penduduk diperoleh realisasi sebesar 1,64 per 5.000 penduduk. Target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 sebesar 1,50 per 5.000 penduduk sehingga capaian kinerja sebesar 109,33% dan termasuk dalam kategori **Sangat Tinggi**. Jika dibandingkan dengan capaian rasio FKTP terhadap jumlah penduduk tahun 2023 mengalami kenaikan dari capaian tahun lalu yaitu 1,63 per 5.000 penduduk.

Berdasarkan KMK RI Nomor HK.01.07/MENKES/2194/2023 tentang Rasio Dokter dan Dokter Gigi terhadap kepersertaan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP dalam rangka peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, rasio dokter terhadap kepersertaan JKN adalah 1:5000. Satu Dokter praktek mandiri melayani 5.000 penduduk, satu klinik melayani 10.000 penduduk, satu Puskesmas melayani 30.000 penduduk. Didapatkan poin nilai Puskemas adalah 6, klinik adalah 2, Dokter praktek Mandiri adalah 1.

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di Kabupaten Purbalingga tahun 2024 terdiri dari 22 Puskesmas, 24 klinik, 161 Dokter Praktik Mandiri (DPM). Rasio FKTP terhadap jumlah penduduk didapatkan dari Jumlah FKTP 312 (Jumlah Puskesmas kali 6, Jumlah klinik kali 2, jumlah DPM kali 1) per jumlah penduduk dikali 5.000 penduduk. Didapatkan hasil 1,64 per 5.000 penduduk. Berikut ini persebaran Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan Kecamatan:

Persebaran jumlah FKTP Berdasarkan Kecamatan
Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

No	Kecamatan	Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)		
		Puskesmas	Klinik	TPMD
1	2	3	4	5
1	Kemangkon	1	1	3
2	Bukateja	2	3	10
3	Kejobong	1	0	5
4	Pengadegan	1	0	4

5	Padamara	1	2	9
6	Kaligondang	2	1	4
7	Purbalingga	2	7	48
8	Kalimanah	1	3	20
9	Karangjambu	1	0	1
10	Kutasari	1	1	4
11	Bojongsari	1	0	7
12	Bobotsari	1	1	7
13	Karanganyar	1	1	4
14	Kertanegara	1	1	1
15	Mrebet	2	0	9
16	Karangreja	1	0	11
17	Karangmoncol	1	2	5
18	Rembang	1	1	9
Jumlah		22	24	161

Salah satu faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat adalah pelayanan kesehatan, hal ini dapat diketahui melalui perbandingan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terhadap jumlah penduduk. Dengan terpenuhinya FKTP maka akan memudahkan akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Adapun beberapa faktor penyebab keberhasilan tercapainya rasio FKTP terhadap jumlah penduduk melebihi target yang ditetapkan adalah:

1) Adanya penambahan Dokter Praktek Mandiri (DPM) di tahun 2024

Hambatan atau kendala dalam pencapaian target kinerja adalah:

1) Masih ada Dokter Praktek Mandiri (DPM yang tidak mengurus surat ijin praktik

2) Ada klinik yang belum terakreditasi, dikarenakan baru dibuka tahun ini.

Berkaitan dengan hal tersebut strategi yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga dalam menindaklanjuti hambatan atau kendala dalam pencapaian target diantaranya sebagai berikut:

1) Monitoring dan pendampingan pembuatan rekomendasi surat ijin praktek pada Dokter Praktek Mandiri (DPM)

Program penunjang tercapainya indikator kinerja Rasio Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terhadap jumlah penduduk adalah Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.

b. Rasio Tenaga Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Cakupan rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk diperoleh realisasi sebesar 350,51 per 100.000 penduduk. Target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga tahun 2024 sebesar 327,45 per 100.000 penduduk sehingga capaian kinerja sebesar 103,73% dan termasuk dalam kategori **Sangat Tinggi**. Jika dibandingkan dengan capaian rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk tahun 2023 mengalami kenaikan dari capaian tahun lalu yaitu 327,45 per 100.000 penduduk.

Seluruh Puskesmas dan Rumah Sakit di Kabupaten Purbalingga sudah memiliki Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar. Dilakukan bimbingan teknis penyajian informasi data SDMK dan perencanaan kebutuhan SDMK untuk menghitung kebutuhan tenaga kesehatan. Untuk meningkatkan kualitas tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Purbalingga dilakukan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan melalui bimbingan teknis sesuai dengan bidang kesehatan.

Tenaga kesehatan di Kabupaten Purbalingga per Desember Tahun 2024 sejumlah 3.637 tenaga kesehatan. Yang terdiri dari Medis sebanyak 432 orang, Psikologi klinis sebanyak 3 orang, Perawat sebanyak 1.469 orang, Bidan sebanyak 764 orang, Kefarmasian sebanyak 372 orang, Kesehatan Masyarakat sebanyak 90 orang, Kesehatan lingkungan sebanyak 57 orang, gizi sebanyak 60 orang, keterampilan fisik sebanyak 23 orang, keteknisian medis sebanyak 170, teknik biomedika sebanyak 191

orang, nakes lainnya sebanyak 6 orang. Adapun beberapa faktor penyebab keberhasilan melebihi target yang ditetapkan adalah:

- 1) Adanya penambahan tenaga kesehatan melalui recruitment ASN
- 2) Rumah Sakit dan Puskesmas di Kabupaten Purbalingga sudah memiliki sumber daya manusia kesehatan sesuai standar

Beberapa faktor hambatan atau kendala dalam pencapaian target kinerja adalah:

- 1) Masih ada beberapa tenaga kesehatan yang belum mengurus surat ijin nakes.
- 2) Belum semua tenaga kesehatan mendapatkan bimtek sesuai dengan tugasnya.

Berkaitan dengan hal tersebut strategi yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga dalam menindaklanjuti hambatan atau kendala dalam pencapaian target kinerja diantaranya sebagai berikut:

- 1) Monitoring dan pendampingan pembuatan rekomendasi surat ijin tenaga kesehatan
- 2) Bimtek terhadap tenaga kesehatan untuk meningkatkan kualitas tenaga kesehatan.
- 3) Peningkatan kerjasama dalam pembinaan dan pengawasan dengan melibatkan lintas program di internal Dinas Kesehatan dan Organisasi Profesi.

4. Tujuan II: Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Dinkes

Kualitas kelembagaan Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga merupakan tingkat efektivitas dan efisiensi dari perangkat daerah dalam menjalankan tugasnya. Kualitas kelembagaan perangkat daerah dapat dievaluasi untuk memastikan bahwa perangkat daerah dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Meningkatnya kualitas kelembagaan perangkat daerah dapat dilakukan dengan melakukan penataan kelembagaan, evaluasi, dan pembinaan.

Dalam perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga tahun 2024 indikator kinerja meningkatnya kualitas kelembagaan daerah adalah Nilai kematangan perangkat daerah. Nilai Kematangan Perangkat Daerah merupakan

nilai yang menunjukkan tingkat kematangan organisasi perangkat daerah. Nilai ini didapatkan dari hasil penilaian kematangan organisasi (KOD) yang dilakukan secara tahunan.

Dari hasil penilaian kematangan organisasi (KOD) yang dilakukan pada tahun 2024 diperoleh nilai kematangan perangkat daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga sebesar 40. Target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga tahun 2024 sebesar 39 sehingga capaian kinerja sebesar 102,56% dan termasuk dalam kategori **Sangat Tinggi**. Jika dibandingkan dengan capaian nilai kematangan Dinas Kesehatan Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 1 angka yaitu dari nilai 39.

Capaian nilai kematangan perangkat daerah dari tahun ke tahun terus meningkat. Diharapkan untuk tahun kedepannya dapat meningkatkan lagi nilai kematangan perangkat daerah.

Adapun beberapa faktor penyebab keberhasilan, diantaranya:

- a. Terpenuhinya bukti dukung kelengkapan indikator penilaian kematangan organisasi (KOD)
 - b. Adanya komitmen pimpinan terkait tercapainya nilai kematangan organisasi.
- Hambatan atau kendala dalam pencapaian target kinerja adalah:

- a. Belum terbentuknya tim penilaian kematangan organisasi (KOD) Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga
- b. Beberapa nilai indikator kematangan organisasi masih belum optimal.

Berkaitan dengan hal tersebut, strategi yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga untuk mengatasi hambatan dan tantangan tersebut diantaranya:

- a. Menyusun surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga tentang tim penilaian kematangan organisasi (KOD)
- b. Meningkatkan nilai indikator kematangan organisasi yang masih belum optimal dengan memperbaiki dokumen-dokumen kelengkapan indikator.

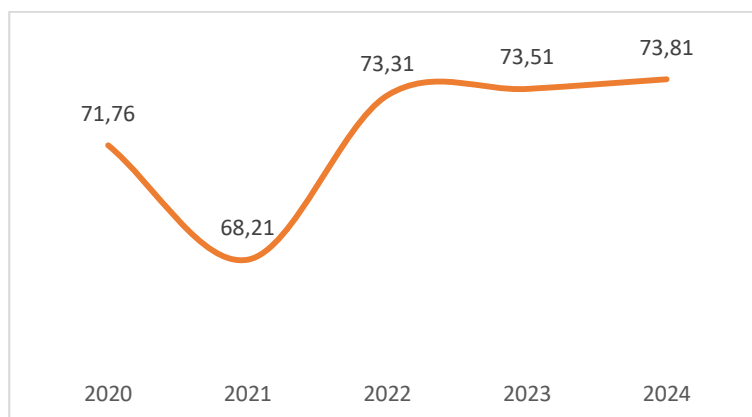
5. Sasaran III: Meningkatnya implementasi SAKIP Dinkes

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah system manajemen kinerja yang berkaitan dengan sistem perencanaan pembangunan dan sistem penganggaran, untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Tujuan evaluasi adalah bentuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggung jawaban atas hasil terhadap penggunaan anggaran dan kemajuan implementasi SAKIP serta memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja.

Dari hasil evaluasi yang telah dilaksanakan oleh Tim SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga diperoleh nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga sebesar 73,81. Target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga tahun 2024 sebesar 73,6 sehingga capaian kinerja sebesar 100,29% dan termasuk dalam kategori **Sangat Tinggi**. Jika dibandingkan dengan capaian nilai SAKIP tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,30 dari 73,51.

Dalam lima tahun terakhir nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga mengalami tren yang fluktuatif. Dimana terjadi penurunan realisasi di tahun 2021, namun dari tahun 2022 hingga tahun 2024 nilai SAKIP selalu mengalami peningkatan. Capaian Kinerja jika dibandingkan terhadap Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 adalah 99,07% dengan target masa akhir Renstra adalah 74,5.

Tren Nilai SAKIP
Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024



Adapun beberapa faktor penyebab keberhasilan tercapainya nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga melebihi target yang ditetapkan adalah:

- a. Terintegrasinya sistem perencanaan, keuangan, monitoring evaluasi, dan kinerja
- b. Adanya komitmen pimpinan terkait penerapan budaya kinerja
- c. Adanya kepatuhan pegawai dalam pelaporan capaian kinerja

Hambatan atau kendala dalam pencapaian target kinerja adalah:

- a. Rapat monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja telah dilaksanakan namun belum dilaksanakan pendalaman yang memadai atas upaya perbaikan kinerja.
- b. Masih perlu meningkatkan pendalaman evaluasi atas pelaksanaan program, kegiatan serta pencapaian target kinerja sehingga dapat memberikan rekomendasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan capaian kinerja pada seluruh indikator kinerja.

Berkaitan dengan hal tersebut strategi yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga dalam menindaklanjuti hambatan atau kendala dalam pencapaian target kinerja diantaranya sebagai berikut:

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian target-target kinerja secara berkala, serta mendokumentasikan secara memadai upaya dalam mencapai target-target kinerja organisasi
- b. Melaksanakan seluruh rekomendasi tim evaluator SAKIP.

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Mengacu pada permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi, visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga terpilih, Renstra Kementerian Kesehatan, Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Purbalingga maka ditetapkan Isu Strategis Bidang Kesehatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 adalah :

- 1) Masih adanya Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita
- 2) Prevalensi penyakit menular utama (HIV/AIDS dan TB) yang masih tinggi serta meningkatnya penyakit tidak menular yang disebabkan oleh pola hidup tidak sehat
- 3) Prevalensi Stunting yang masih tinggi
- 4) Kurangnya jumlah puskesmas terhadap rasio jumlah penduduk dan akses rumah sakit yang terpusat di wilayah perkotaan
- 5) Masih rendahnya indeks keluarga sehat

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan kesehatan di Purbalingga, Dinas Kesehatan sebagai *leading sector* merencanakan dan melaksanakan berbagai kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut terbagi dalam 5 program yaitu:

1. Program Urusan Penunjang Pemerintah Daerah.
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Dari perencanaan awal untuk dapat melaksanakan program/kegiatan tersebut diatas sekurang-kurangnya dibutuhkan anggaran Rp. 172.272.378.000/tahun. Karena keterbatasan dana, untuk mengatasi hal tersebut maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disusun dengan prinsip skala prioritas, pemanfaatan dana yang efisien, dan kegiatan yang efektif yang mempunyai daya ungkit guna mencapai visi dan misi pembangunan kesehatan Purbalingga

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Rancangan Awal				Hasil Analisis Kebutuhan			
				Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											
	A. Program Urusan Penunjang Pemerintah Daerah			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja		100 persen	121.333.052.000	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja		100 persen	121.333.052.000
				Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti		100 persen		Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti		100 persen	
				Persentase ketersediaan layanan kepegawaian administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 persen		Persentase ketersediaan layanan kepegawaian administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 persen	
				Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan		100 persen		Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan		100 persen	
				Persentase pengadaan barang milik daerah		100 persen		Persentase pengadaan barang milik daerah		100 persen	
				Persentase pemeliharaan barang milik daerah		100 persen		Persentase pemeliharaan barang milik daerah		100 persen	
				Persentase ketersediaan layanan BLUD		100 persen		Persentase ketersediaan layanan BLUD		100 persen	
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Persentase dokumen perencanaan dan laporan yang tersusun		100 persen	13.000.000	Persentase dokumen perencanaan dan laporan yang tersusun		100 persen	13.000.000
		Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Purbalingga	2 Dokumen	10.000.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Purbalingga	2 Dokumen	10.000.000	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Rancangan Awal				Hasil Analisis Kebutuhan			
				Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif
			Perangkat Daerah								
			Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Purbalingga	5 dokumen	3.000.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Purbalingga	5 dokumen	3.000.000
		2. Administrasi Keuangan		Persentase ASN yang menerima gaji tepat waktu		100 Persen	120.219.152.000	Persentase ASN yang menerima gaji tepat waktu		100 Persen	120.219.152.000
			Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Purbalingga	1.640 orang	120.029.252.000	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Purbalingga	1.640 orang	120.029.252.000
			Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Purbalingga	54 Dokumen	90.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Purbalingga	54 Dokumen	90.000.000
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Purbalingga	5 dokumen	99.900.000	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Purbalingga	5 dokumen	99.900.000
		3. Administrasi Barang Milik Daerah		Persentase Administrasi umum dinas yang difasilitasi		100 persen	4.800.000	Persentase Administrasi umum dinas yang difasilitasi		100 persen	4.800.000
			Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Purbalingga	1 Laporan	4.800.000	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Purbalingga	1 Laporan	4.800.000
		4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Peraturan Perundang-Undangan yang terselesaikan yang tersosialisasikan		100 Persen	8.000.000	Persentase Peraturan Perundang-Undangan yang terselesaikan yang tersosialisasikan		100 persen	8.000.000
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti	Kab. Purbalingga	36 orang	5.000.000	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Purbalingga	36 Orang	5.000.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Rancangan Awal				Hasil Analisis Kebutuhan			
				Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif
			Tugas dan Fungsi	pendidikan dan pelatihan							
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bintek perundang-undangan	Kab. Purbalingga	30 orang	3.000.000	Jumlah orang yang mengikuti bintek perundang-undangan	Kab. Purbalingga	30 orang	3.000.000
		5. Administrasi Umum		Persentase Administrasi umum dinas yang yang difasilitasi		100 Persen	85.000.000	Persentase Administrasi umum dinas yang yang difasilitasi		100 persen	85.000.000
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Purbalingga	1 paket	4.000.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Purbalingga	1 paket	4.000.000
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Purbalingga	1 paket	51.000.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Purbalingga	1 paket	51.000.000
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Purbalingga	24 Dokumen	3.000.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Purbalingga	24 Dokumen	3.000.000
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Purbalingga	15 Laporan	8.000.000	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Purbalingga	15 Dokumen	12.000.000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Purbalingga	50 Laporan	12.000.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Purbalingga	50 Laporan	11.000.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Rancangan Awal				Hasil Analisis Kebutuhan			
				Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Purbalingga	9 dokumen	7.000.000	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Purbalingga	9 dokumen	8.800.000
			6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan BMD yang harus disediakan		100 Persen	50.000.000			100 persen	50.000.000
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Purbalingga	4 Unit	50.000.000	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kab. Purbalingga	4 Unit	50.000.000
			7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase dokumen yang harus dikirim		100%	763.000.000	Persentase dokumen yang harus dikirim		100 persen	763.000.000
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Purbalingga	20 Laporan	1.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Purbalingga	20 Laporan	1.000.000
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Purbalingga	60 Laporan	300.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Purbalingga	60 Laporan	300.000.000
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Purbalingga	12 Laporan	12.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Purbalingga	12 Laporan	12.000.000
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Purbalingga	12 Laporan	450.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Purbalingga	12 Laporan	450.000.000
			7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD yang terpelihara		100%	380.000.000	Persentase BMD yang terpelihara		100 persen	380.000.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Rancangan Awal				Hasil Analisis Kebutuhan			
				Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Purbalingga	39 unit	325.000.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Purbalingga	39 unit	325.000.000
			Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Purbalingga	40 unit	30.000.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Purbalingga	40 unit	30.000.000
			Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Purbalingga	2 unit	25.000.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Purbalingga	2 unit	25.000.000
	B. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat			Persentase Status akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Minimal Madya		100 Persen	48.670.467.000	Persentase Status akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Minimal Madya		100 Persen	48.670.467.000
				Rasio Puskesmas thd jumlah penduduk		2,25 sd 2,30 per 100.000		Rasio Puskesmas thd jumlah penduduk		2,25 sd 2,30 per 100.000	
				Prevalensi Stunting		11 Persen		Prevalensi Stunting		11 Persen	
				Angka Morbiditas		17,6 Persen		Angka Morbiditas		17,6 Persen	
		1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota		Cakupan fasilitasi pelayanan primer		100 Persen	17.270.000.000	Cakupan fasilitasi pelayanan primer		100 persen	17.270.000.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Rancangan Awal				Hasil Analisis Kebutuhan			
				Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif
				Persentase Puskesmas dan RS dengan ketersediaan sapras, alkes sesuai standar		100 Persen		Persentase Puskesmas dan RS dengan ketersediaan sapras, alkes sesuai standar		100 Persen	
				Rasio Puskesmas dan RS thd jumlah penduduk		3,3 per 100.000		Rasio Puskesmas dan RS thd jumlah penduduk		3,3 per 100.000	
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Kab. Purbalingga	3 Unit	3.000.000.000	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Kab. Purbalingga	3 unit	3.000.000.000
			Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh fasilitas kesehatan lainnya	Kab. Purbalingga	3 unit	3.000.000.000	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh fasilitas kesehatan lainnya	Kab. Purbalingga	3 Unit	3.000.000.000
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan / Alat penunjang medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	Gambarsari, Purbalingga	191 unit	1.000.000.000	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Purbalingga	191 unit	1.000.000.000
			Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah alat kesehatan / alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	Kab. Purbalingga	2 unit	150.000.000	Jumlah alat kesehatan / alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	Kab. Purbalingga	10 unit	150.000.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Rancangan Awal				Hasil Analisis Kebutuhan			
				Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif
			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Kab. Purbalingga	2 paket	10.100.000.000	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Kab. Purbalingga	2 Paket	.10.100.000.000
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Kab. Purbalingga	250.000 keluarga	10.000.000	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Kab. Purbalingga	250.000 Keluarga	10.000.000
			Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Purbalingga	22 Paket	10.000.000	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Purbalingga	23 Paket	10.000.000
		2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan anak usia pendidikan dasar yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar		100 Persen	31.325.367.000	Cakupan anak usia pendidikan dasar yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar		100 persen	31.325.367.000
				Cakupan pelayanan ibu hamil		100 Persen		Cakupan pelayanan ibu hamil		100 Persen	
				Cakupan pelayanan Ibu bersalin		100 Persen		Cakupan pelayanan Ibu bersalin		100 Persen	
				Cakupan pelayanan Bayi Baru Lahir		100 Persen		Cakupan pelayanan Bayi Baru Lahir		100 Persen	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Rancangan Awal				Hasil Analisis Kebutuhan			
				Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif
				Cakupan pelayanan Balita		100 Persen		Cakupan pelayanan Balita		100 Persen	
				Cakupan pelayanan balita gizi buruk		100 Persen		Cakupan pelayanan balita gizi buruk		100 Persen	
				Cakupan usia lanjut yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar		100 Persen		Cakupan usia lanjut yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar		100 Persen	
				Cakupan puskesmas yang telah menerapkan K3 internal Puskesmas		100 Persen		Cakupan puskesmas yang telah menerapkan K3 internal Puskesmas		100 Persen	
				Cakupan Desa ODF		100 Persen		Cakupan Desa ODF		100 Persen	
				Cakupan desa/kel mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi kurang dari 24 jam		100 Persen		Cakupan desa/kel mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi kurang dari 24 jam		100 Persen	
				Cakupan kegiatan surveilans penyakit menular dan tidak menular yang terselenggara		100 Persen		Cakupan kegiatan surveilans penyakit menular dan tidak menular yang terselenggara		100 Persen	
				Cakupan kasus KIP yang yang dinvestigasi		100 Persen		Cakupan kasus KIP yang yang dinvestigasi		100 Persen	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	12.144 orang	110.000.000	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	16.214 bumil	110.000.000
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	11.781 orang	130.000.000	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	16.214 Bulin	130.000.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Rancangan Awal				Hasil Analisis Kebutuhan			
				Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	11.648 orang	150.000.000	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	14.589 Bayi	150.000.000
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	52.578 orang	35.000.000	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	58.681 Balita	35.000.000
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	40.225 orang	80.000.000	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	141.976 Anak	80.000.000
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	669.907 orang	30.000.000	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	604.136 orang	30.000.000
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	131.773 orang	12.000.000	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	114.718 Orang	12.000.000
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	236.224 orang	15.000.000	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	268.926 orang	15.000.000
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	14.017 orang	15.000.000	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	268.926 orang	15.000.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Rancangan Awal				Hasil Analisis Kebutuhan			
				Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	2.634 orang	10.000.000	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	2.471 Orang	10.000.000
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	14.086 orang	100.000.000	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	7.675 Orang	100.000.000
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	15.076 orang	185.000.000	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	17.831 Orang	185.000.000
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Purbalingga	3 Dokumen	280.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Purbalingga	3 Dokumen	280.000.000
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Purbalingga	3 Dokumen	80.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Purbalingga	3 Dokumen	80.000.000
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Purbalingga	4 Dokumen	160.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Purbalingga	4 Dokumen	160.000.000
			Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kab. Purbalingga	6 Dokumen	270.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kab. Purbalingga	8 Dokumen	270.000.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Rancangan Awal				Hasil Analisis Kebutuhan			
				Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Kab. Purbalingga	2 Dokumen	5.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Kab. Purbalingga	2 Dokumen	5.000.000
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Purbalingga	23 Dokumen	270.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Purbalingga	23 Dokumen	270.000.000
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. Purbalingga	138 orang	12.500.000	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. Purbalingga	138 orang	12.500.000
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. Purbalingga	890 orang	10.000.000	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. Purbalingga	890 orang	10.000.000
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Purbalingga	15 Dokumen	261.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Purbalingga	15 Dokumen	261.000.000
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kab. Purbalingga	12 Dokumen	26.926.989.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kab. Purbalingga	12 Dokumen	26.926.989.000
			Pengambilan dan pengiriman specimen penyakit potensial KLB ke	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusika	Kab. Purbalingga	560 Paket	424.763.000	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Kab. Purbalingga	560 Paket	424.763.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Rancangan Awal				Hasil Analisis Kebutuhan			
				Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif
			Laboratorium Rujukan/Nasional								
			Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Kab. Purbalingga	9 Dokumen	5.000.000	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Kab. Purbalingga	9 Dokumen	5.000.000
			Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Purbalingga	23 Dokumen	1.000.000.000	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Purbalingga	23 Dokumen	1.000.000.000
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Purbalingga	26 Dokumen	51.485.000	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Purbalingga	26 Dokumen	51.485.000
			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kab. Purbalingga	15 Dokumen	10.000.000	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kab. Purbalingga	15 Laporan	10.000.000
			Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Kab. Purbalingga	23 unit	290.000.000	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Kab. Purbalingga	23 unit	290.000.000
			Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kab. Purbalingga	2 Dokumen	396.630.000	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kab. Purbalingga	2 Dokumen	135.740.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Rancangan Awal				Hasil Analisis Kebutuhan			
				Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif
			4. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase sistem Informasi pada fasilitas pelayanan kesehatan yang terintegrasi dalam SIK		100 Persen	60.100.000	Persentase sistem Informasi pada fasilitas pelayanan kesehatan yang terintegrasi dalam SIK		100 persen	60.100.000
			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kab. Purbalingga	40 Dokumen	60.100.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kab. Purbalingga	40 Dokumen	60.100.000
			5. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota	Cakupan rekomendasi izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dikeluarkan		100 Persen	15.000.0000	Cakupan rekomendasi izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dikeluarkan		15.000.0000	15.000.0000
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Kab. Purbalingga	9 unit	5.000.000	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Kab. Purbalingga	9 unit	5.000.000
			Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	54 unit	5.000.000	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	54 unit	5.000.000
			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Kab. Purbalingga	54 unit	5.000.000	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Kab. Purbalingga	54 unit	5.000.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Rancangan Awal				Hasil Analisis Kebutuhan			
				Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif
		C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		Persentase puskesmas dengan 9 (sembilan) jenis tenaga kesehatan sesuai standar		100 persen	783.211.000	Persentase puskesmas dengan 9 (sembilan) jenis tenaga kesehatan sesuai standar		100 persen	783.211.000
		1. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota		Cakupan Tenaga Kesehatan yang mendapatkan ijin praktek		93 persen	10.500.000	Cakupan Tenaga Kesehatan yang mendapatkan ijin praktek		93 persen	10.500.000
			Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Kab. Purbalingga	150 dokumen	7.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Kab. Purbalingga	150 dokumen	7.000.000
			Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Kab. Purbalingga	150 dokumen	3.500.000	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Kab. Purbalingga	150 dokumen	3.500.000
		2. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Cakupan RSUD dan Puskesmas yang memiliki SDMK sesuai standar (%)		100 persen	91.831.000	Cakupan RSUD dan Puskesmas yang memiliki SDMK sesuai standar (%)		100 persen	91.831.000
			Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya manusia kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kab. Purbalingga	50 orang	16.200.000	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kab. Purbalingga	50 orang	16.200.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Rancangan Awal				Hasil Analisis Kebutuhan			
				Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif
			Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kab. Purbalingga	200 dokumen	75.631.000	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kab. Purbalingga	200 dokumen	75.631.000
		3. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase SDM Kesehatan yang memiliki sertifikasi tenaga kesehatan		93 Persen	680.880.000	Persentase SDM Kesehatan yang memiliki sertifikasi tenaga kesehatan		100 persen	680.880.000
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya manusia	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Kab. Purbalingga	189 orang	680.880.000	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Kab. Purbalingga	189 orang	680.880.000
		D. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman		Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian yang memenuhi standar		100 persen	206.326.000	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian yang memenuhi standar		100 persen	206.326.000
				Persentase PIRT bersertifikat yang dilakukan pembinaan dan pengawasan		100 persen		Persentase PIRT bersertifikat yang dilakukan pembinaan dan pengawasan		100 persen	
		1. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Persentase rekomendasi pemberian ijin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang dikeluarkan		100 Persen	10.000.000	Persentase rekomendasi pemberian ijin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang dikeluarkan		100 persen	10.000.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Rancangan Awal				Hasil Analisis Kebutuhan			
				Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kab. Purbalingga	39 Dokumen	10.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kab. Purbalingga	30 Dokumen	10.000.000
			Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-	-	-	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-	-	-
		2. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian yang memenuhi standar Persentase PIRT bersertifikat yang dilakukan pembinaan dan pengawasan			100 Persen	10.000.000	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian yang memenuhi standar Persentase PIRT bersertifikat yang dilakukan pembinaan dan pengawasan		10.000.000	10.000.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Rancangan Awal				Hasil Analisis Kebutuhan			
				Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif
			Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	Kab. Purbalingga	92 dokumen	10.000.000	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Kab. Purbalingga	92 dokumen	10.000.000
		3. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Persentase rekomendasi pemberian ijin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang dikeluarkan		100 Persen	10.000.000	Persentase rekomendasi pemberian ijin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang dikeluarkan		10.000.000	10.000.000
			Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kab. Purbalingga	120 dokumen	10.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kab. Purbalingga	92 Dokumen	10.000.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Rancangan Awal				Hasil Analisis Kebutuhan			
				Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif
			Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga								
		3. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		Persentase Hasil pemeriksaan post market yang ditindaklanjuti		100%	186.326.000	Persentase Hasil pemeriksaan post market yang ditindaklanjuti		186.326.000	186.326.000
			Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Kab. Purbalingga	154 unit	186.326.000	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Kab. Purbalingga	154 Unit	186.326.000
	E. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan			Persentase Desa/kelurahan Sehat mandiri		46,1 persen	1.279.322.000	Persentase Desa/kelurahan Sehat mandiri		36%	1.279.322.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Rancangan Awal				Hasil Analisis Kebutuhan			
				Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif
			1. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase organisasi masyarakat yang mendapatkan penyuluhan melalui media promosi		100%	1.150.000.000	Persentase organisasi masyarakat yang mendapatkan penyuluhan melalui media promosi		100 persen	1.150.000.000
			Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kab. Purbalingga	13 Dokumen	1.150.000.000	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kab. Purbalingga	13 Dokumen	1.150.000.000
			2. Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan RT yang ber PHBS		100 persen	56.000.000	Cakupan RT yang ber PHBS		100 persen	56.000.000
			Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kab. Purbalingga	5 Dokumen	56.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kab. Purbalingga	5 Dokumen	56.000.000
			3. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan desa sehat mandiri		46,1 persen	73.322.000	Cakupan desa sehat mandiri		46,1 persen	73.322.000
			Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Purbalingga	3 Dokumen	73.322.000	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Purbalingga	3 Dokumen	73.322.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Rancangan Awal				Hasil Analisis Kebutuhan			
				Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif
				TOTAL			172.272.378.000				172.272.378.000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Setiap usulan pembangunan yang masuk akan ditelaah kesesuaiannya dengan program prioritas pembangunan daerah. Usulan tersebut dapat berupa usulan yang ditujukan secara langsung maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan maupun desa.

Masukan dari legislatif melalui pokok-pokok pikiran anggota legislatif serta usulan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten Purbalingga lainnya akan menjadi acuan dasar bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga untuk membuat usulan program/kegiatan. Usulan masuk yang sesuai dengan program prioritas pembangunan daerah akan diprioritaskan untuk masuk dalam program/kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga.

Usulan program dan kegiatan masyarakat Tahun 2026 yang diterima oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga sebanyak 25 usulan dengan rincian 12 usulan jambanisasi, 1 usulan pelatihan kader kesehatan, 1 usulan pengadaan alat kesehatan, 11 usulan pengadaan ambulance desa.

USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN
Jambanisasi / ODF	Kondisi masyarakat masih banyak yang belum memiliki jamban yang sehat	Dusun 1-5 Desa Larangan, Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Pengadegan	Larangan
Jambanisasi / ODF	Kebersihan desa perlu di tunjangan dengan jambanisasi yang baik, untuk menghindari penyakit yang muncul diakibatkan oleh kotornya sistem jambanisasi yang belum ada.	Desa Pekalongan, Bojongsari, Purbalingga, Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Bojongsari	Pekalongan
Pengadaan ambulans desa	Belum tersedia Mobil Siaga Desa	Desa Kramat, Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Karangmoncol	Kramat
Pelatihan kelembagaan desa	Perlunya pembinaan kader-kader kesehatan desa	Desa kalimanah wetan, Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Kalimanah	Kalimanah Wetan

Pengadaan ambulans desa	Desa Panunggalan letaknya jauh dari pusat kesehatan masyarakat	Desa Panunggalan Dusun I dan II, Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Pengadegan	Panunggalan
Pengadaan ambulans desa	Belum maksimalnya pelayanan kesehatan di desa terutama untuk pelayanan masyarakat yang sakit dan harus dirujuk ke pos kesehatan terdekat	bungkanel, Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Karanganyar	Bungkanel
Pengadaan ambulans desa	Jarak Tempuh Ke Rumah Sakit Cukup jauh serta sebagai bentuk siaga terhadap masyarakat di bidang sosial dan siaga bencana	RT. 01 RW 01 Dusun I, Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Kemangkon	Kedunglegok
Jambanisasi / ODF	Masih banyak warga yang BAB sembarangan	Desa Candiwulan, Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Kutasari	Candiwulan
Jambanisasi / ODF	Masih banyak warga masyarakat yang belum mempunyai jamban sehat di rumah, dikarenakan keterbatasan lahan	Dusun I, Dusun II, Dusun III, dan Dusun IV Desa	Kab. Purbalingga	Bojongsari	Galuh

		Galuh, Kab. Purbalingga			
Pembangunan MCK Komunal/ Jambanisasi desa	Masih Banyak Warga yang belum memiliki Jamban	Dusun I,Dusun II dan Dusun III, Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Bojongsari	Beji
Jambanisasi / ODF	masih banyak rumah yang belu memiliki jamban	Desa Tangkisan Kecamatan mrebet, Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Mrebet	Tangkisan
Pengadaan ambulans desa	Belum ada	Desa Tetel, Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Pengadegan	Tetel
Pengadaan ambulans desa	Belum ada Fasilitas Ambulan Desa sedangkan Warga banyak yang membutuhkan	Desa Karangsari, Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Karangmoncol	Karangsari

Pengadaan ambulans desa	ada beberapa warga kurang mampu/miskin penderita penyakit menahun yang melakukan cuci darah dan membutuhkan pelayanan transportasi gratis	Tlahab Lor, Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Karangreja	Tlahab Lor
Pengadaan ambulans desa	Kurangnya fasilitas mobilisasi untuk warga yg belum punya kendaraan yang sakit	Desa Karangreja, Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Karangreja	Karangreja
Jambanisasi / ODF	banyak rumah penduduk miskin yang belum memiliki jamban	Desa Tamansari, Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Karangmoncol	Tamansari
Pengadaan ambulans desa	masyarakat sangat membutuhkan	Desa Rajawana Kec,Karangmoncol Kab.Purbalingga, Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Karangmoncol	Rajawana
Jambanisasi / ODF	Masih adanya rumah tangga baru yang menumpang WC	Desa Cipawon, Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Bukateja	Cipawon

Pengadaan alat kesehatan	Desa tidak memiliki mobil siaga	Desa Serang, Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Karangreja	Serang
Pengadaan ambulans desa	Untuk mempercepat pelayanan desa bidang kesehatan	Desa Baleraksa, Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Karangmoncol	Baleraksa
Jambanisasi / ODF	Masih terdapat warga yang belum memiliki jamban layak	GUNUNGKARANG DUSUN I dan II, Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Bobotsari	Gunungkarang
Pengadaan alat kesehatan	Minimnya Alat Kesehatan Di Desa Sirau	Posyandu Desa Sirau, Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Karangmoncol	Sirau

Jambanisasi / ODF	Masyarakat Desa Sirau Masih Ada yang Buang Air Besar Sembarangan Di Desa Sirau	Dusun 1, Dusun 2, Dusun 3, Dusun 4, dan Dusun 5 Desa Sirau, Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Karangmoncol	Sirau
Pengadaan ambulans desa	Keterbatasan Akses Layanan Ke Pusat Kesehatan	Pandansari Kec.Kejobong, Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Kejobong	Pandansari
Jambanisasi / ODF	masih banyak warga yg odf di bantaran sungai dan belum memiliki jamban mandiri di rumah	KARANGMALANG, Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Bobotsari	Karangmalang

2.6 Strategi Untuk Peningkatan Kinerja

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga di masa mendatang, antara lain:

1. Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam penanganan kegawatdaruratan maternal Neonatal dengan sistem drill baik secara mandiri oleh faskes maupun pendampingan dari dokter spesialis dan tim
2. Pendampingan ibu hamil risti oleh kader kesehatan
3. Optimalisasi Tim SAKIP sesuai dengan tugas dan fungsinya

Masih adanya indikator kinerja yang belum mampu dicapai sesuai target yang telah ditetapkan, menunjukkan perlu adanya peningkatan kinerja dan analisis penyelesaian terhadap hambatan yang ada sehingga seluruh target yang telah ditetapkan mampu dicapai dengan baik.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Sistem kesehatan Indonesia telah mengalami beberapa perubahan besar dalam beberapa tahun terakhir. Dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, kemajuan teknologi, dan tantangan kesehatan yang semakin kompleks, transformasi sistem kesehatan menjadi salah satu misi yang digaungkan Kementerian Kesehatan RI. Transformasi sistem kesehatan merupakan suatu upaya untuk mengubah sistem kesehatan yang sudah ada agar dapat lebih efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan kesehatan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memperluas aksesibilitas, dan mengurangi disparitas dalam kesehatan antar wilayah.

Transformasi sistem kesehatan mengusung 6 pilar yang menjadi strategi atau peta jalan dalam memajukan dan meningkatkan sistem kesehatan, antara lain: (1) Transformasi Layanan Primer, (2) Transformasi Layanan Rujukan, (3) Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan, (4) Transformasi Sistem Pembiayaan Kesehatan, (5) Transformasi Sumber Daya Manusia Kesehatan, dan (6) Transformasi Teknologi Kesehatan.

Harapan utama dari transformasi sistem kesehatan adalah meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Saat ini, masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas. Transformasi sistem kesehatan diharapkan dapat mengatasi masalah ini dan memberikan layanan kesehatan yang lebih baik dan lebih efisien bagi masyarakat.

Harapan lain dari transformasi sistem kesehatan adalah memperluas aksesibilitas layanan kesehatan. Meskipun pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan aksesibilitas, namun masih banyak masyarakat yang sulit mengakses pelayanan kesehatan. Transformasi sistem kesehatan diharapkan dapat memberikan aksesibilitas yang lebih baik kepada masyarakat, terutama di daerah terpencil dan sulit dijangkau.

Selain itu, transformasi sistem kesehatan juga diharapkan dapat mengurangi disparitas dalam kesehatan antara wilayah. Saat ini, masih banyak perbedaan dalam kesehatan antara daerah perkotaan dan pedesaan, antara wilayah yang memiliki

aksesibilitas yang baik dan yang tidak. Transformasi sistem kesehatan diharapkan dapat mengatasi masalah ini dan mengurangi perbedaan dalam kesehatan antara wilayah.

Meskipun transformasi sistem kesehatan memiliki harapan yang besar, namun masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaannya. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya sumber daya manusia dan finansial di daerah. Banyak daerah yang masih memiliki keterbatasan sumber daya manusia dan finansial dalam menjalankan transformasi sistem kesehatan. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mengadopsi sistem kesehatan yang baru dan mengimplementasikannya secara efektif.

Selain itu, masih ada tantangan dalam pengembangan infrastruktur kesehatan yang memadai. Infrastruktur kesehatan yang memadai sangat penting untuk mendukung transformasi sistem kesehatan. Namun, masih banyak daerah yang memiliki infrastruktur kesehatan yang kurang memadai, terutama di daerah terpencil dan sulit dijangkau.

Transformasi layanan primer: merevitalisasi Posyandu agar menjadi lebih formal dengan anggaran yang sesuai. Nantinya Posyandu ini bisa diatur oleh Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Posyandu ini akan bertindak secara lebih aktif bukan hanya melayani bayi dan ibu tapi akan melayani seluruh siklus hidup termasuk remaja, dewasa, dan Lansia.

Transformasi layanan rujukan: Transformasi ini akan dimulai dengan tiga penyakit penyebab kematian paling tinggi di Indonesia yaitu penyakit jantung, stroke, dan kanker.

Ketahanan kesehatan:Kemenkes memastikan bahwa vaksin diagnostik dan terapeutik itu semuanya ada di Indonesia. Minimal 50% itu diproduksi di dalam negeri dari hulu ke hilir

Pembiayaan kesehatan: melakukan transparansi dan perhitungan yang bagus. Hal itu untuk menghindari terjadinya masalah antara penyedia jasa dan yang membayar jasa

SDM Kesehatan: Jumlah dokter standarnya satu per 1000 penduduk. Kebutuhan di Indonesia masih belum terpenuhi ditambah lagi dengan distribusi yang belum merata. Pemerataan SDM Kesehatan yang berkualitas diperlukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui academic health system.

Academic health system merupakan sebuah model kebijakan yang mengakomodir potensi masing-masing institusi ke dalam satu rangkaian visi yang berbasis pada

kebutuhan masyarakat. Konsep ini merupakan integrasi pendidikan kedokteran bergelar, dengan program pendidikan profesional kesehatan lainnya yang memiliki rumah sakit pendidikan atau berafiliasi dengan rumah sakit pendidikan, sistem kesehatan, dan organisasi pelayanan kesehatan.

Melalui *academic health system* diharapkan dapat menghitung jumlah dan jenis lulusan SDM Kesehatan dan memenuhi kebutuhan wilayah; Mendefinisikan profil dan value SDM Kesehatan yang diperlukan di wilayah tersebut; serta menentukan pola distribusi SDM Kesehatan yang sustainable mulai dari layanan primer hingga tersier. Kebutuhan dokter harus diperbanyak, harus ada akselerasi dan 10 tahun terakhir ini akselerasinya sangat lambat

Teknologi Kesehatan: Salah satu transformasi teknologi kesehatan yang sedang diupayakan selain aplikasi Peduli Lindungi, kemenkes akan memastikan rekam medis di rumah sakit dicatat dan direkam dengan baik secara digital, dengan demikian data akan masuk ke databasenya rumah sakit. Sehingga kalau satu pasien pindah rumah sakit maka pasien tidak perlu melakukan rontgen ulang atau tes darah ulang sehingga itu akan jauh lebih efisien.

Bioteknologi: bioteknologi itu bisa dipakai sebagai alat diagnosis yang canggih dimana sebelumnya untuk melihat kondisi kesehatan seseorang diambil dari darah, MRI, CT Scan namun kedepan diagnosisnya menggunakan genom sequencing karena dengan ini bisa dilihat secara benar-benar rinci mengenai kondisi kesehatan kita dan dampak kedepan dari suatu penyakit.

Sistem transformasi kesehatan utamanya transformasi layanan primer dan transformasi layanan rujukan sangat mempengaruhi penurunan upaya penurunan AKI dan AKB di Kabupaten Purbalingga dimana kedua indikator tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) pembangunan puskesmas. Angka kematian ibu dan angka kematian bayi merupakan indikator kesejahteraan masyarakat dari suatu bangsa.

Target	TARGET INDIKATOR 2026		
	AKI	AKB	AKBA
RPJMN	183/100.000 KH	16/1.000 KH	-

PURBALINGGA	67,57/100.000 KH	7,50/1.000 KH	8,99/1.000 KH
-------------	------------------	---------------	---------------

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pembangunan kesehatan Kabupaten Purbalingga jika mengacu pada RPJMN dan RPJMD Jawa Tengah tahun 2018-2024 sudah pada jalan yang benar. Hal ini ditunjukkan dari target indikator kesehatan yang ada di Kabupaten Purbalingga lebih tinggi dari target yang ditetapkan oleh Provinsi maupun Nasional. Dengan meningkatkan kinerja dari sumber daya kesehatan dan dukungan lintas sektor serta partisipasi dari masyarakat pada saatnya target tersebut dapat tercapai.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Mengacu pada sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 yang secara langsung berkaitan dengan urusan kesehatan, Dalam upaya menjawab isu dan permasalahan dalam urusan pembangunan bidang kesehatan, maka tujuan jangka menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga adalah "*Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat*", dengan indikator Usia Harapan Hidup dan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga adalah:

1. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Dinas Kesehatan, dengan indikator nilai Kematangan Perangkat Daerah 42:
 - a. Meningkatkan kualitas kelembagaan Dinkes, dengan nilai SAKIP Dinkes 74,1.
2. Menurunnya Angka Mortalitas dan Morbiditas, dengan indikator :
 - a. Angka Kematian Ibu (AKI) 67,57/ 100.000 Kelahiran Hidup (KH);
 - b. Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB) 7,43/ 1.000 KH;
 - c. Menurunnya Angka Kematian Balita (AKBA) 8,92/ 1.000 KH;
 - d. Indeks Keluarga Sehat 0,8
3. Meningkatnya kapasitas sumber daya kesehatan
 - a. Rasio Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terhadap jumlah penduduk (Per 5000 penduduk) 1,69 per 5000 penduduk;
 - b. Rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk (Per 100.000 penduduk) 358,29

per 100.000 penduduk

3.3 Program dan kegiatan Perangkat Daerah

Indikator program yang juga tercantum dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Persentase Status akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Minimal Madya atau sederajat 100 persen
2. Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk 2,3/100.000 penduduk
3. Prevalensi stunting (data EPPGM) 11,5 persen
4. Angka morbiditas 17,6 persen
5. Persentase puskesmas dengan 9 (sembilan) jenis tenaga kesehatan sesuai standar 100 persen
6. Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian yang memenuhi standar 100 persen
7. Persentase PIRT bersertifikat yang dilakukan pembinaan dan pengawasan 100 persen
8. Persentase Desa/Kelurahan Sehat Mandiri 36 persen

Berikut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan subkegiatan:
 - i. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - ii. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan subkegiatan:
 - i. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - ii. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - iii. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah
 - i. Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - i. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - ii. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan subkegiatan:
 - i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- ii. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- iii. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- iv. Fasilitasi Kunjungan Tamu
- v. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- vi. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - i. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan subkegiatan:
 - i. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - ii. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - iii. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - iv. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan subkegiatan:
 - i. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - ii. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - iii. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan subkegiatan:
 - i. Rehabilitasi Puskesmas
 - ii. Pembangunan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
 - iii. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - iv. Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - v. Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
 - vi. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
 - vii. Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan

- b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan subkegiatan:
- i. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
 - ii. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
 - iii. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
 - iv. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
 - v. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
 - vi. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
 - vii. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
 - viii. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
 - ix. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
 - x. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
 - xi. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
 - xii. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
 - xiii. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
 - xiv. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
 - xv. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
 - xvi. Pelayanan Promosi Kesehatan
 - xvii. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
 - xviii. Pengelolaan Surveilans Kesehatan
 - xix. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
 - xx. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
 - xxi. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
 - xxii. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
 - xxiii. Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan Nasional
 - xxiv. Operasional Pelayanan Rumah Sakit
 - xxv. Operasional Pelayanan Puskesmas
 - xxvi. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
 - xxvii. Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
 - xxviii. Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu

(SPGDT)

- xxix. Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria
- xxx. Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
- c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi, dengan subkegiatan:
 - i. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
- d. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan subkegiatan:
 - i. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
 - ii. Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - iii. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
- 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota, dengan subkegiatan:
 - i. Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
 - ii. Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
 - b. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota, dengan subkegiatan:
 - i. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
 - ii. Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - c. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan subkegiatan:
 - i. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman, dengan subkegiatan sebagai berikut:
 - a. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), dengan subkegiatan:
 - i. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat

Tradisional (UMOT)

- b. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga, dengan subkegiatan:
 - i. Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-minuman industri Rumah Tangga yang beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
- 5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan subkegiatan:
 - i. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - b. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan subkegiatan:
 - i. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
 - c. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan subkegiatan:
 - i. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027		OPD Pengampu
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1.02	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Menurunnya angka mortalitas dan morbiditas	Usia Harapan Hidup		74,3				74,3		
		Angka Kematian Ibu		67,57				67,57		
		Angka Kematian Bayi		7,43				7,43		
		Angka Kematian Balita		8,92				8,92		
		Indeks Keluarga Sehat		0,8				0,8		

				Meningkatnya kapasitas sumber daya kesehatan	Rasio Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terhadap jumlah penduduk (Per 5000 penduduk)		1,69			1,69		
					Rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk (Per 100.000 penduduk)		358,29			358,29		
				Meningkatkan kualitas kelembagaan Dinkes	Nilai Kematangan Perangkat Daerah		42			42		
				Meningkatnya implementasi SAKIP Dinkes	Nilai Sakip Dinkes		74,1			74,1		
1.02.01				A. Program Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja		100 persen	121.369.512.000	DAU	100 persen	119.470.500.000	
					Persentase temuan pengeloaan anggaran yang ditindaklanjuti		100 persen			100 persen		

					Persentase ketersediaan layanan kepegawaian administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 persen				100 persen		
					Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan		100 persen				100 persen		
					Persentase pengadaan barang milik daerah		100 persen				100 persen		
					Persentase pemeliharaan barang milik daerah		100 persen				100 persen		
					Persentase ketersediaan layanan BLUD		100 persen				100 persen		
1.02.01.2.01				1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan yang tersusun		100 persen	14.000.000			100 persen	14.000.000	
1.02.01.2.01.00 01				Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	Kab. Purbalingga	2 Dokumen	10.000.000	DAU	Renja, DPA	2 Dokumen	10.000.000	Dinkes

				Perangkat Daerah	Perangkat Daerah								
1.02.01.2.01.0007				Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Purbalingga	5 dokumen	3.000.000	DAU	SAKIP, LKJiP, LKPJ, SPIP, Laba2	5 dokumen	4.000.000	Dinkes
1.02.01.2.02				2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang menerima gaji tepat waktu		100%	120.219.152.000			100%	120.219.252.000	
1.02.01.2.02.0001				Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Purbalingga	1640 orang	120.029.252.000	DAU		1640 orang	120.029.252.000	Dinkes
1.02.01.2.02.0002				Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Purbalingga	54 Dokumen	90.000.000	DAU	Fasilitasi perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah 609 OH, 70 OH luar daerah 535 OH dalam daerah	54 Dokumen	90.000.000	Dinkes
1.02.01.2.02.0004				Koordinasi dan Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan	Kab. Purbalingga	5 dokumen	99.900.000	DAU	Honor PPTK, PPKom/	5 Dokumen	100.000.000	Dinkes

				Akuntansi SKPD	Pelaksanaan Akuntansi SKPD					Bendahara pembantu, Penyusunan LKD			
1.02.01.2.03				3. Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase Administrasi umum dinas yang yang difasilitasi		100 persen	4.800.000			100 persen	4.800.000	
1.02.01.2.03.0006				Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Purbalingga	1 Laporan	4.800.000	DAU	Honorarium Pejabat Pengadaan, Pengurus Barang dan pengurus barang pembantu	1 Laporan	4.800.000	Dinkes
1.02.01.2.05				4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peraturan Perundang-Undangan yang terselesaikan yang tersosialisasikan		100%	8.000.000			100%	9.000.000	
1.02.01.2.05.0009				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang	Kab. Purbalingga	36 Orang	5.000.0000	DAU		36 Orang	5.000.000	Dinkes

				Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan								
1.02.01.2.05.00 11				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bintek perundang-undangan	Kab. Purbalingga	37 orang	3.000.000	DAU	Fasilitasi ASN untuk mengikuti Bimtek perundang-undangan	37 orang	4.000.000	Dinkes
1.02.01.2.06				5. Administrasi Umum	Persentase Administrasi umum dinas yang difasilitasi		100%	85.000.000			100%	89.000.000	
1.02.01.2.06.00 01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Purbalingga	1 paket	4.000.000	DAU		1 paket	4.000.000	Dinkes
1.02.01.2.06.00 04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Purbalingga	1 paket	51.000.000	DAU		1 paket	55.000.000	Dinkes
1.02.01.2.06.00 06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Kab. Purbalingga	24 Dokumen	3.000.000	DAU		24 Dokumen	3.000.000	Dinkes

				Perundang-Undangan	Undangan yang Disediakan								
1.02.01.2.06.0008				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Purbalingga	15 Laporan	8.000.000	DAU		15 Laporan	8.000.000	Dinkes
1.02.01.2.06.0009				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Purbalingga	50 Laporan	12.000.000	DAU		50 Laporan	12.000.000	Dinkes
1.02.01.2.06.0011				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan PelaksanaanSistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Purbalingga	9 dokumen	7.000.000	DAU	Fasilitasi untuk operator SIMDA, Operator SIMASET	9 dokumen	7.000.000	Dinkes
1.02.01.2.07				6. Pengadaan barang milik daerah	Persentase ketersediaan BMD yang harus disediakan		100 persen	50.000.000			100 persen	50.000.000	
1.02.01.2.07.0006					Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Purbalingga	4 unit	50.000.000	DAU		10 unit	50.000.000	Dinkes

1.02.01.2.08				7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase dokumen yang harus dikirim		100%	763.000.000			100%	763.000.000	
1.02.01.2.08.00 01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Purbalingga	20 Laporan	1.000.000	DAU		20 Laporan	1.000.000	Dinkes
1.02.01.2.08.00 02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Purbalingga	60 Laporan	300.000.000	DAU		60 Laporan	300.000.000	Dinkes
1.02.01.2.08.00 03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Purbalingga	12 Laporan	12.000.000	DAU	Jasa pengharu m ruangan, baner, spanduk, tinta printer.	12 Laporan	12.000.000	Dinkes
1.02.01.2.08.00 04				.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Purbalingga	12 Laporan	450.000..000	DAU	Fasiltasi untuk tenaga penungjan g pemerinta	12 Laporan	450.0000.000	Dinkes

									h daerah sejumlah 19 org			
1.02.01.2.09			7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD yang terpelihara		100 persen	380.000.000			100 persen	380.000.000	
1.02.01.2.08.00 02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Purbalingga	39 unit	325.000.000	DAU	Penyediaan BBM operasional, oli dan spare part kendaraan , Pajak kendaraan bermotor, mobil 13 unit mobil 26 unit	39 unit	325.000.000	Dinkes
1.02.01.2.08.00 06			Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Purbalingga	40 unit	30.000.000	DAU	Pemeliharaan telepon/pa bx, jaringan telepon, PC/Notebook. Pemeliharaan	40 unit	30.000.000	Dinkes

									aan peralatan Personal Computer, Peralatan Jaringan, dan pemelihar aan Instalasi- instalasi lain				
1.02.01.2.08.00 09				Pemeliharaa n /Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	Kab. Purbalingga	2 unit	25.000.000	DAU	Pemilhara an gedung	2 unit	25.000.000	Dinkes
1.02.02.		B. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat			Persentase Status akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Minimal Madya		100 Persen	46.403.500.000			100 Persen	46.403.500.000	
					Rasio Puskesmas thd jumlah penduduk		2,25 sd 2,30 per 100.000				2,25 sd 2,30 per 100.000		
					Prevalensi Stunting		11 Persen				11 Persen		

					Angka Morbiditas		17,6 Persen				17,6 Persen		
1.02.02.2.01				1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Cakupan fasilitasi pelayanan primer		100 Persen	12.170.000.000			100 Persen	12.170.000.000	
					Persentase Puskesmas dan RS dengan ketersediaan sapras, alkes sesuai standar		100 Persen				100 Persen		
					Rasio Puskesmas dan RS thd jumlah penduduk		3,3 per 100.000				3,3 per 100.000		
1.02.02.2.01				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah				12.170.000.000				12.170.000.000	

				Kabupaten/ Kota									
1.02.02.2.01.00 02				Rehabilitasi dan Pemeliharaa n Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Pengadegan , Karang Tengah, Bukateja	3 unit	3.000.000.000	DBHCH T DAU		3 unit	3.000.000.000	Dinkes
1.02.02.2.01.00 10				Rehabilitasi dan Pemeliharaa n Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh fasilitas kesehatan lainnya	Mrebet, Kaligondang , Bukateja	5 unit	3.000.000.000	DAK Fisik	Rehabilita si Pustu	5 unit	3.000.000.000	Dinkes
1.02.02.2.01.00 14				Pengadaan alat kesehatan / Alat peninjang medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan / Alat peninjang medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	Gambarsari, Purbalingga	100 unit	1.000.000.000	DBHCH T	-	100 Unit	1.000.000.000	Dinkes

1.02.02.2.01.00 20				Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	10 unit	150.000.000	DBHCH T		10 unit	150.000.000	Dinkes
1.02.02.2.01.00 23				Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Kab. Purbalingga	2 paket	10.100.000.000	DBHCH T, DAK Non Fisik		2 paket	5.000.000.000	Dinkes
1.02.02.2.01.00 24				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Kab. Purbalingga	250.000 Keluarga	10.000.000	DAU		250.000 Keluarga	10.000.0000	Dinkes
1.02.02.2.01.00 26				Distribusi Alat	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan,	Kab. Purbalingga	22 Paket	10.000.000.	DAU	Bahan Repacking	22 Paket	10.000.000	Dinkes

				Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya					Obat, biaya distribusi obat			
1.02.02.2.02				2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan anak usia pendidikan dasar yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar		100 Persen	33.980.500.000			100 Persen	33.980.500.000	Dinkes
					Cakupan pelayanan ibu hamil		100 Persen				100 Persen		
					Cakupan pelayanan Ibu bersalin		100 Persen				100 Persen		
					Cakupan pelayanan Bayi Baru Lahir		100 Persen				100 Persen		

					Cakupan pelayanan Balita		100 Persen				100 Persen		
					Cakupan pelayanan balita gizi buruk		100 Persen				100 Persen		
					Cakupan usia lanjut yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar		100 Persen				100 Persen		
					Cakupan puskesmas yang telah menerapkan K3 internal Puskesmas		100 Persen				100 Persen		
					Cakupan Desa ODF		100 Persen				100 Persen		
					Cakupan desa/kel mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi kurang dari 24 jam		100 Persen				100 Persen		
					Cakupan kegiatan surveilans		100 Persen				100 Persen		

					penyakit menular dan tidak menular yang terselenggara								
					Cakupan kasus KIPI yang yang dinvestigasi		100 Persen				100 Persen		
1.02.02.2.02.00 01				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	12.144 orang	110.000.000	DAU Spesifik Kesehatan	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ANC sesuai standar (K6) dan 10T, peningkatan kapasitas bidan dan AMP	12.144 orang	110.000.000	Dinkes
1.02.02.2.02.00 02				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	11.781 orang	130.000.000	DAU, DAK NF	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan sesuai standar, transpor	11.781 orang	30.000.000	Dinkes

										ibu bersalin			
1.02.02.2.02.0003				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	11.648 orang	150.000.000.	DAU	Setiap Bayi baru lahir mendapat kan pelayanan neonatal esential sesuai standar, MTBS orientasi shk	11.648 orang	150.000.000	Dinkes
1.02.02.2.02.0004				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	52.578 orang	35.000..000	DAU	Seiap balita mendapat kan pelayanan sesuai standar, SDITK dan Imunisasi dasar lengkap	52.578 orang	35.000.000	Dinkes

1.02.02.2.02.00 05				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	40.225 orang	80.000.000	DAU	sekolah sehat bias	40.225 orang	80.000.000	Dinkes
1.02.02.2.02.00 06				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	669.907 orang	30.000.000	DAU	Skreening PTM pada usia produktif kanker leher rahim	669.907 orang	30.000.000	Dinkes
1.02.02.2.02.00 07				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	131.773 orang	12.000.000	DAU	Pendampingan Cargiver	131.773 orang	10.000.000	Dinkes
1.02.02.2.02.00 08				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	236.224 orang	15.000.000	DAU	Pembinaan berhenti merokok dan KTR	236.224 orang	15.000.000	Dinkes

1.02.02.2.02.00 09				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	14.017 orang	15.000.000	DAU	Gerakan pengendalian DM	14.017 orang	15.000.000	Dinkes
1.02.02.2.02.00 10				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	2.634 orang	10.000.000	DAU	Refreshing pengelola kes jiwa puskesmas	2.634 orang	10.000.000	Dinkes
1.02.02.2.02.00 11				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	14.086 orang	100.000.000	DAU Spesifik Kesehatan	Target Eliminasi TBC th 2030	14.086 orang	100.000.000	Dinkes
1.02.02.2.02.00 12				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan	Kab. Purbalingga	15.076 orang	185.000.000	DAU, spesifik kesehatan	Target Three Zero Th 2030	15.076 orang	475.000.000	Dinkes

				Terinfeksi HIV	Pelayanan Sesuai Standar								
1.02.02.2.02.00 15				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Purbalingga	3 Dokumen	280.000.000	DAU Spesifik kesehatan	Surveilans gizi, PKMK balita, pengadaan iodine tes	3 Dokumen	300.000.000	Dinkes
1.02.02.2.02.00 16				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Purbalingga	3 Dokumen	80.000.000	DAU, DAK NF	UKK, Sitko, K3 Fasyankes	3 Dokumen	80.000.000	Dinkes
1.02.02.2.02.00 17				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Purbalingga	4 Dokumen	160.000.000	DAU, DAK NF	STBM, TPP, TFU, KKS	4 Dokumen	900.000.000	Dinkes
1.02.02.2.02.00 18				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kab. Purbalingga	6 Dokumen	270.000.000	DAK Non Fisik	Gerakan cegah stunting, akzi bergizi, dll		220.000.000	Dinkes

1.02.02.2.02.00 19				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Kab. Purbalingga	2 Dokumen	5.000.000	DAU		2 Dokumen	5.000.000	Dinkes
1.02.02.2.02.00 20				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Purbalingga	23 Dokumen	270.000.000	DAU, DAK NF	AFP 5 kasus, Campak 18 kasus	23 Dokumen	185.000.000	Dinkes
1.02.02.2.02.00 21				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. Purbalingga	138 orang	12.500.000	DAU		138 orang	12.500.000	Dinkes
1.02.02.2.02.00 22				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. Purbalingga	890 orang	10.000.000	DAU	Skrining jiwa di sekolah	890 orang	40.000.000	Dinkes

1.02.02.2.02.00 25				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Purbalingga	15 Dokumen	261.000.000	DAU, Spesifik Kesehatan	program penyakit menular dan tidak menular lainnya : malaria, kusta, diare, Hepatitis, Ispa, DBD, Leptospirosis, Filariasis, Asma, Decomp cordis, Ginjal	15 Dokumen	300.000.000	Dinkes
1.02.02.2.02.00 26				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kab. Purbalingga	12 Dokumen	26.926.989.000	Pajak rokok, DAU spesifik kesehatan, DBHCH T	Iuran JKN maskin, bantuan iur JKN	12 Dokumen	27.000.000.000	Dinkes
1.02.02.2.02.00 28				Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke	Kab. Purbalingga	560 paket	424.763.000	DAK NF	Pengiriman sampel	560 paket	20.000.000	Dinkes

				KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasi onal	Laboratorium Rujukan/Nasiona l yang Didistribusikan								
1.02.02.2.02.00 32				Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Kab. Purbalingga	9 Dokumen	5.000.000	DAU	8 RS	9 Dokumen	5.000.000	Dinkes
1.02.02.2.02.00 33				Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Purbalingga	23 Dokumen	1.000.000.000	DAU	23 Dokumen	23 Dokumen	8.000.000	Dinkes
1.02.02.2.02.00 34				Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Purbalingga	26 Dokumen	51.485.000	DAK NF- BOKKB	26 fasyankes	26 Dokumen	10.000.000	Dinkes
1.02.02.2.02.00 36				Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kab. Purbalingga	15 Laporan	10.000.000	DAU	15 Kasus KIPI	15 Laporan	10.000.000	Dinkes

				Pemberian Obat Massal)									
1.02.02.2.02.00 38				Penyediaan dan Pengeloaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Kab. Purbalingga	23 Unit	290.000.000	DAU	96 kasus kegawatda ruratan	23 unit	290.000.000	Dinkes
1.02.02.2.02.00 46				Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kab. Purbalingga	2 dokumen	396.630.000	DAK NF-BOKKB		2 Dokumen	396.650.000	Dinkes
1.02.02.2.03.				3. Penyelenggaraa n Sistem Informasi	Persentase sistem Informasi pada fasilitas pelayanan		100 Persen	60.100.000			100 Persen	70.000.000	

			Kesehatan secara Terintegrasi	kesehatan yang terintegrasi dalam SIK								
1.02.02.2.03.00 02			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kab. Purbalingga	40 Dokumen	60.100.000	DAU		40 Dokumen	70.000.000	Dinkes
1.02.02.2.04.			4. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota	Cakupan rekomendasi izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dikeluarkan		100 Persen	9.672.000			100 Persen	183.000.000	
1.02.02.2.04.00 01			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Kab. Purbalingga	9 unit	5.000.000	DAU		9 unit	4.000.000	Dinkes

1.02.02.2.04.00 02				Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/K ota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	54 unit	5.000.000	DAU		54 unit	4.000.000	Dinkes
1.02.02.2.04.00 03				Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Kab. Purbalingga	54 unit	5,000,000	DAU		54 unit	175.000.000	Dinkes
1.02.03.		C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan			Persentase puskesmas dengan 9 (sembilan) jenis tenaga kesehatan sesuai standar		100 persen	783.211.000			100 persen	1.490.413.000	
1.02.03.2.01.			1. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di	Cakupan Tenaga Kesehatan yang mendapatkan ijin praktek			93 persen	8.700.000			95 persen	10.200.000	

			Wilayah Kabupaten/Kota									
1.02.03.2.01.00 01			Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Kab. Purbalingga	150 dokumen	7.000.000	DAU	150 dokumen	150 dokumen	6.000.000	Dinkes
1.02.03.2.01.00 02			Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Kab. Purbalingga	150 dokumen	3.500.000	DAU	150 dokumen	150 dokumen	4.200.000	Dinkes
1.02.03.2.03.			3. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Cakupan RSUD dan Puskesmas yang memiliki SDM Kesehatan sesuai standar (%)		100 persen	91.831.000			100 persen	327.628.000	

1.02.03.2.03.00 02				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kab. Purbalingga	50 orang	16.200.000	DAU	50 nakes	50 orang	20.000.000	Dinkes
1.02.03.2.03.00 03				Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kab. Purbalingga	200 dokumen	75.631.000	DAU	200 dokumen	200 dokumen	307.628.000	Dinkes
1.02.03.2.03.				4. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Kesehatan yang memiliki sertifikasi tenaga kesehatan		93 Persen	680.880.000			95 Persen	680.880.000	
1.02.03.2.04.00 01				Pengembang an Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Purbalingga	189 orang	680.880.000	DAK NF	Pelatihan yg diselengga rakan dlm rangka	189 orang	1.152.585.000	Dinkes

				Sumber Daya manusia	yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya					meningkatkan kompetensi SDM kesehatan			
1.02.04.				D. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian yang memenuhi standar		100 persen	206.326.000			100 persen	478.514.000	
					Persentase PIRT bersertifikat yang dilakukan pembinaan dan pengawasan		100 persen				100 persen		
1.02.04.2.01.				1. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase rekomendasi pemberian izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang dikeluarkan		100 Persen	10.000.000			100 Persen	65.000.000	Dinkes
1.02.04.2.01.0001				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan	Kab. Purbalingga	30 Dokumen	10.000.000	DAU		30 Dokumen	65.000.000	Dinkes

				Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)								
1.02.04.2.03.				Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase rekomendasi pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal usaha mikro obat tradisional (UMOT) yang dikeluarkan		100 Persen	10.000.000	DAU		100 Persen	220.000.000	Dinkes

1.02.04.2.03.00 01			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kab. Purbalingga	92 Dokumen	10.000.000	DAU		92 Dokumen	220.000.000	Dinkes
1.02.04.2.01.			1. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian yang memenuhi standar Persentase PIRT bersertifikat yang dilakukan		100 Persen	186.326.000			100 Persen	193.514.000	

			Industri Rumah Tangga	pembinaan dan pengawasan								
1.02.04.2.06.00 01			Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Kab. Purbalingga	154 Unit	186.326.000	DAK NF		154 Unit	193.514.000	Dinkes
1.02.05.		E. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		Persentase Desa/kelurahan Sehat mandiri		46,1 %	1.150.000.000			54,39%	2.322.780.000	
1.02.05.2.01.		1. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		3 Dokumen	1.150.000.000			3 Dokumen	2.322.780.000	

1.02.05.2.01.00 01				Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kab. Purbalingga	13 Dokumen	1.150.000.000	DAU, DAU Spesifik bidang kesehatan	Pengadaan 5 Mobil siaga desa dan siaran radio, Strata DSM, Pembinaan KTR	13 Dokumen	1.150.000.000	Dinkes
1.02.05.2.02.				2. Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan RT yang ber PHBS		100%	56.000.000			100%	60.000.000	
1.02.05.2.02.00 01				Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kab. Purbalingga	5 Dokumen	56.000.000	DAU	Strata PHBS, Strata UKS, Germas, IL P, Media Promkes	5 Dokumen	60.000.000	Dinkes
1.02.05.2.03.				3. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan	Cakupan desa sehat mandiri		41,8 %	76.340.000		Tahun 2026 100 desa, tahun	54,39%	99.560.000	

			Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						2026 110 des			
1.02.05.2.03.00 01			Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Purbalingga	3 Dokumen	73.322.000	DAU, DAK NF	Pembinaan poskestren, Pokjanal posyandu	3 Dokumen	99.560.000	Dinkes
				TOTAL			168.250.991.000				170.325.267.000	

BAB V

PENUTUP

Demikian Renja OPD Tahun 2026 Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga disusun sebagai sarana untuk mengarahkan segenap jajaran Kesehatan untuk mencapai Purbalingga yang sehat mandiri. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 merupakan rencana kerja tahunan yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2026. Renja ini merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan tahun 2026.

A. Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan bidang kesehatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2026. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Dinas Kesehatan.

B. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi Jawa Tengah, maupun APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya

2. Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2026.

C. Rencana Tindak Lanjut

1. Perlu penguatan kelembagaan dan peran masing-masing stakeholder dalam pembangunan kesehatan
2. Perlunya komitmen kuat dalam pengawalan upaya-upaya pembangunan kesehatan yang masih memerlukan upaya keras
3. Perlunya upaya sinkronisasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan terutama untuk pencapaian indikator standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan
4. Diperlukannya kebijakan strategis dan inovatif dalam penyelarasan penyelesaian permasalahan kesehatan dengan keterlibatan berbagai pihak, sesuai dengan kewenangan, aturan dan dapat dipertanggungjawabkan
5. Perlunya monitoring dan evaluasi dalam implementasi Rencana Kerja Pembangunan Kesehatan yang telah diusulkan dan ditetapkan
6. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, dan pelaksanaan di masyarakat sehingga transparansi akan lebih terwujud.

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2026, selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan tahun 2026 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang.

Keberhasilan pembangunan tersebut lebih ditentukan oleh semangat, sikap mental, disiplin dan kejujuran seluruh jajaran kesehatan serta peran serta aktif lintas sektor dan peran serta masyarakat pada umumnya.

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PURBALINGGA

dr.JUSI FEBRIANTO, MPH
Pembina Tk I
NIP. 19700219 200212 1 004